

KONSTRUKSI



Media Informasi & Komunikasi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Edisi 4 Tahun 2017

**KEMENTERIAN PUPR OPTIMIS
MAMPU TINGKATKAN DAYA
SAING INFRASTRUKTUR**

**KEMENTERIAN PUPR
SOFT LAUNCHING LAYANAN
KONSULTASI INVESTASI
INFRASTRUKTUR BERBASIS *WEB***

**BERSINERGI DENGAN
STAKEHOLDERS KONSTRUKSI**

**PEMERINTAH DUKUNG
PENGEMBANGAN KARIR
INSINYUR DI INDONESIA**



K3



**IMPLEMENTASIKAN K3
JALANKAN AMANAH
UU NO. 2 TAHUN 2017**

3 | BERITA UTAMA

Pekan Jasa Konstruksi 2017: Implementasikan K3, Jalankan Amanah UU No. 2 Tahun 2017



BERITA UTAMA

- 5 | Kementerian PUPR *Soft Launching* Layanan Konsultasi Investasi Infrastruktur Berbasis Web
- 7 | Tingkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja Konstruksi Melalui MTU

BERITA TERKINI

- 10 | Peran DJBK dalam Peningkatan Kinerja Pengusahaan BUMN Perum Bidang Sumber Daya Air dan Perumahan
- 12 | Kementerian PUPR Optimis Mampu Tingkatkan Daya Saing Infrastruktur
- 14 | Pemerintah Dukung Pengembangan Karir Insinyur di Indonesia
- 16 | Pengembangan Mitigasi Risiko Investasi Infrastruktur

LIPUTAN KHUSUS

- 18 | Lomba Tukang dan Uji Kompetensi & Sertifikasi dengan Menggunakan *Mobile Training Unit*
- 20 | Seminar Kecelakaan Kerja Konstruksi dalam Perspektif Kontrak Konstruksi
- 21 | Bersinergi dengan *Stakeholders* Konstruksi Sertifikasi 3255 Tenaker Konstruksi Secara Serentak Mendapatkan Rekor MURI
- 23 | Peninjauan Proyek oleh Awak Media, Bukti Implementasi UJJK pada Proyek Infrastruktur di Palembang
- 24 | Uji dan Sertifikasi Tukang Terampil dalam Mendukung Pembangunan *Jakabaring Sport City*, Palembang

KILAS BERITA

- 26 | Kementerian PUPR Bekerja Sama dengan PT. Brantas, Uji Sertifikasi Tenaker Konstruksi
- 27 | Kementerian PUPR Gandeng *United Tractor* untuk Menjalinkan Pelatihan
- 28 | Kementerian PUPR Dukung Penyelesaian Sengketa Konstruksi melalui Arbitrase

GALERI FOTO

- 29 | Perayaan Hari Kemerdekaan RI ke-72
- 30 | Penyerahan *Mobile Training Unit* (MTU)
- 31 | Sertifikasi Massal

Merdeka! Seruan yang diucapkan pada bulan Agustus untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus. Semarak Kemerdekaan dirasakan juga oleh tim redaksi yang turut bersemangat untuk mempersembahkan yang terbaik bagi bangsa melalui artikel-artikel menarik seputar perkembangan sektor konstruksi dan dinamikanya yang terus menggeliat maju.

Di usia 72 tahun, yang berarti bangsa ini telah memasuki usia matang, semangat membangun dengan kerja bersama terus dikobarkan. Semangat yang sama juga dirasakan Ditjen Bina Konstruksi untuk Kerja Bersama meningkatkan kualitas SDM bidang konstruksi terutama di Indonesia Bagian Timur dengan menyerahtherimakan pinjam pakai MTU kepada Gubernur Sulawesi Tengah, Plt. Gubernur Sulawesi Tenggara, Gubernur Nusa Tenggara Barat, dan Sekda Provinsi Jawa Timur. Penyerahtherimaan MTU ini juga mendapat apresiasi dari Anggota Komisi V DPR RI.

Tidak hanya kemeriahan menyambut hari Kemerdekaan Republik Indonesia, namun kemeriahan juga kami hadirkan pada buletin edisi 4 kali ini, melalui laporan dan artikel berbagai kegiatan menarik berskala besar yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.

Diantaranya, Sertifikasi 3255 Tenaga Kerja Konstruksi secara serentak, hasil kerja sama yang baik antara Kementerian PUPR dengan *stakeholders* konstruksi. Acara ini dibuka langsung oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Pintu VII Gelora Bung Karno Jakarta. Membanggakan, karena acara ini masuk ke dalam rekor MURI sebagai 'Pelaksanaan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Terbanyak' secara serentak dalam satu kali Pelaksanaan.

Kemudian, untuk kembali mengingatkan masyarakat akan pentingnya peningkatan daya saing infrastruktur, Ditjen Bina Konstruksi menyelenggarakan Forum Nasional Daya Saing Infrastruktur yang menampilkan narasumber-narasumber terkemuka. Acara ini didahului dengan konferensi pers, beberapa hari sebelumnya, untuk menyebarluaskan informasi kepada insan-insan media akan pelaksanaan Forum Nasional ini.

Dilaksanakan di Werdhapura Bali, Ditjen Bina Konstruksi menyelenggarakan *Dispute Board International Conference* dan *Workshop* sebagai acara untuk menggali lebih dalam bagaimana seluk beluk penyelesaian sengketa konstruksi melalui jalur di luar pengadilan. Narasumber terkemuka di bidang sengketa konstruksi, baik dari dalam maupun luar negeri mengisi acara yang dibuka oleh Kepala Balitbang Kementerian PUPR mewakili Menteri PUPR ini.

Tidak kurang dari sepuluh kegiatan dilaksanakan pada Pekan Jasa Konstruksi 2017 yang dilaksanakan sejak 28 Agustus hingga 22 September 2017 di Palembang. Acara seperti ini diharapkan dilaksanakan pula di daerah lain, terutama dimana Balai Jasa Konstruksi berada.

Terakhir, pembaca sekalian, akan disajikan informasi bahwa saat ini telah terdapat layanan konsultasi investasi infrastruktur yang bisa diakses melalui URL <http://lintas.pu.go.id>. Dengan adanya layanan dan konsultasi informasi investasi infrastruktur bidang PUPR yang berbasis digital, maka seluruh pemangku kepentingan dapat mengakses informasi dan layanan investasi infrastruktur PUPR di mana saja, kapan saja, dan pada perangkat apapun (*anywhere, anytime, any devices*).

Semangat para pejuang kemerdekaan semoga tidak hanya menjadi jargon tapi terus tertanam dalam sanubari setiap insan konstruksi. Bersama KITA membangun! Merdeka!

Redaksi

Pembina/Pelindung: Direktur Jenderal Bina Konstruksi. **Dewan Redaksi:** Sekretaris Ditjen Bina Konstruksi; Direktur Bina Investasi Infrastruktur; Direktur Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi; Direktur Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi; Direktur Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi; Direktur Kerja sama dan Pemberdayaan. **Pemimpin Umum:** Hambali. **Pemimpin Redaksi:** Kristinawati Pratiwi Hadi. **Penyunting / Editor:** Indri Eka Lestari, Mirza Ayu Anindita, Hari Mahardika. **Redaksi Sekretariat:** Thyoria Mariska Girsang, Agus Raharyo, Emy Zubir, Vita Puspitasari, Maria Ulfa. **Administrasi dan Distribusi:** M. Aldenny, Tri Berkah, Agus Firngadi. **Desain dan Tata Letak:** Dagu Komunika. **Fotografer:** Sri Bagus Herutomo.

KONSTRUKSI

Alamat Redaksi:

Gedung Utama Lt. 10

Jl. Pattimura No.20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Tlp/Fax : 021-72797847,

E-Mail : hukumdatakompu.djbc@gmail.com



Pekan Jasa Konstruksi 2017:

Implementasikan K3, Jalankan Amanah UU No. 2 Tahun 2017

Dalam upaya menyebarkan pemahaman terkait UU Jasa Konstruksi pada masyarakat, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melaksanakan kegiatan Pekan Jasa Konstruksi 2017 yang dilaksanakan sejak 28 Agustus hingga

22 September 2017 di Palembang. Pada pembukaan acara tersebut, Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Yusid Toyib, menyampaikan bahwa Pekan Jasa Konstruksi ini dilakukan untuk mensosialisasikan Undang-Undang Jasa Konstruksi No.2 Tahun 2017 khususnya

di Palembang, yang lahir untuk menjawab tantangan jasa konstruksi yang telah berubah sejalan dengan perkembangan dunia konstruksi yang

terbuka menuju industri konstruksi yang berkelanjutan. Salah satu isu penting yang diangkat pada UU Jasa Konstruksi adalah mengenai penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada proyek konstruksi. Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Walikota Palembang, Harnojoyo. Ia menekankan pentingnya penerapan K3 dalam pelaksanaan proyek.

"Harapannya pada kesempatan kali ini peserta, khususnya tukang, dapat mengutamakan prinsip K3 dalam bekerja," ujar Harnojoyo.

Pentingnya penerapan K3 pada setiap aspek pekerjaan konstruksi juga ditekankan oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono baru-baru ini saat mensertifikasi 3255 orang tenaga kerja konstruksi secara serentak. Dalam kesempatan ini Yusid menyampaikan mengenai pentingnya sertifikasi tenaga konstruksi.

"Saya berpesan agar para pihak terus membantu menyebarkan kesadaran



pentingnya sertifikasi tenaga kerja konstruksi”, kata Yusid.

Penyelenggaraan konstruksi dengan segala faktor dan kompleksitasnya dapat menimbulkan risiko tinggi bagi keselamatan dan kesehatan baik pekerja maupun masyarakat umum jika tidak dikelola dengan baik. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Bina Konstruksi terus berupaya mengurangi angka kecelakaan kerja dan juga meningkatkan

keamanan bangunan. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi yang baru diresmikan Januari lalu. Dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2017 ini, aspek keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan konstruksi dari sebuah bangunan tercantum dalam Bab VI.

Bangunan konstruksi memerlukan keamanan dan kenyamanan. Oleh karena itu, aman, nyaman, dan tahan lama merupakan suatu keharusan pada suatu produk konstruksi. Penerapan K3 merupakan suatu kewajiban untuk pembangunan infrastruktur khususnya bidang PUPR. Hal ini juga untuk mengurangi kecelakaan kerja maupun kecelakaan konstruksi, mengingat sektor konstruksi merupakan salah satu sektor dengan tingkat risiko kecelakaan kerja yang tinggi. Pentingnya K3 akan turut mendorong daya saing dan kualitas pekerjaan konstruksi itu sendiri yang pada gilirannya akan menguntungkan masyarakat sebagai pengguna hasil pekerjaan konstruksi.

Untuk melihat lebih jelas akan pelaksanaan K3 pada proyek konstruksi, salah satu rangkaian kegiatan pada pembukaan Pekan Jasa Konstruksi adalah mengunjungi proyek Stadion Jakabaring dan Proyek LRT. Kedua proyek ini dinilai telah berhasil menjalankan K3 sehingga layak

untuk dijadikan contoh implementasi K3 dalam proyek pembangunan infrastruktur. Selain mengunjungi lokasi proyek konstruksi juga diadakan seminar dengan judul “Seminar Kecelakaan Kerja Konstruksi dalam Perspektif Kontrak Konstruksi”.

Rangkaian acara lain yang dilaksanakan pada Pekan Jasa Konstruksi Palembang antara lain: Lomba Tukang Konstruksi (yang telah dilaksanakan sejak 25 Agustus), Pameran Bidang Jasa Konstruksi yang diikuti oleh *stakeholder* dan direktorat-direktorat di Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Demo Pelatihan Jarak Jauh (*Distance Learning*), Pameran *Mobile Training Unit* (MTU), *Workshop* Pemberdayaan Jasa Konstruksi, *Workshop* Evaluasi Uji Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Terampil dan seterusnya.

Kegiatan ini menghadirkan berbagai pihak *stakeholder* konstruksi dari pemerintah provinsi dan kota, asosiasi profesi serta mitra kerja dengan jumlah peserta pembukaan sebanyak 360 peserta. Kegiatan ini juga disponsori oleh Bank SumselBabel, Semen Baturaja dan Askrimdo. Dengan banyaknya mitra kerja yang menjadi peserta kegiatan ini, diharapkan akan memperkuat jalinan kerja sama serta meningkatkan kapasitas dan penyelenggaraan jasa konstruksi. Serta lebih jauh lagi meningkatkan daya saing infrastruktur Indonesia.*



Pentingnya penerapan K3 pada setiap aspek pekerjaan konstruksi juga ditekankan oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono baru-baru ini saat mensertifikasi 3255 orang tenaga kerja konstruksi secara serentak.



Presiden Joko Widodo dalam Program Nawacita Kabinet Kerja telah menuangkan komitmennya dalam melakukan percepatan penyelenggaraan infrastruktur. Dalam rancangan Teknokratik Bappenas, pembangunan infrastruktur periode 2015-2019 membutuhkan se-besar Rp1.915 T, sehingga dengan kemampuan pemenuhan oleh pemerintah hanya sebesar 67% atau Rp1.289 T, terdapat *gap* pembiayaan sebesar Rp626 T. Pada periode 2015-2016, total investasi dari proyek KPBU telah mencapai sebesar Rp194,4T dengan sebagian besar investasi berada pada sektor jalan tol. Pencapaian ini mengurangi *gap* yang perlu dipenuhi sampai tahun 2019, melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau yang lebih dikenal dengan



Kementerian PUPR *Soft Launching* Layanan Konsultasi Investasi Infrastruktur Berbasis *Web*

Public Private Partnership (PPP), menjadi sekitar Rp431,5 T.

Adanya Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 terkait Percepatan Proyek Strategis Nasional, semakin mempertegas komitmen pemerintah dalam percepatan penyelenggaraan infrastruktur. Dalam PerPres ini, mayoritas dari proyek-proyek strategis nasional merupakan tugas Kementerian PUPR, yaitu: 69 (enam puluh sembilan) proyek jalan tol, 5 (lima) proyek jalan nasional non-tol, program satu juta

rumah, 8 (delapan) proyek sistem penyediaan air minum, 1 (satu) proyek penyediaan infrastruktur air limbah komunal, 3 (tiga) proyek pembangunan pos lintas batas negara (PLBN) beserta sarana penunjang, 54 (lima puluh empat) bendungan dan 7 (tujuh) proyek irigasi.

Untuk mendukung program percepatan penyelenggaraan infrastruktur termasuk Proyek Strategis Nasional tersebut, diperlukan pembiayaan yang besar, yang tidak bisa hanya mengandalkan dana yang

bersumber dari pemerintah. Presiden Joko Widodo, dalam sidang kabinet paripurna, menyatakan bahwa kunci dari peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional ada di investasi. Maka itu, selama dua tahun belakangan ini, pemerintah berupaya keras untuk mengurangi hambatan-hambatan yang ada bagi dunia investasi di tanah air. Dalam rangka mengurangi hambatan investasi dan mendorong tingkat partisipasi swasta, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat



melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, telah mengembangkan sistem layanan dan konsultasi investasi infrastruktur yang dapat memberikan kemudahan bagi pihak swasta untuk berinvestasi di infrastruktur bidang PUPR. *Soft launching* Layanan dan konsultasi investasi infrastruktur yang dilaksanakan pada Kamis (31/8) lalu di Jakarta ini, diharapkan dapat menjadi terobosan sekaligus inovasi dalam peningkatan pelayanan publik, menurunkan biaya transaksi proyek skema KPBU, mengurangi asimetris informasi dari penyediaan infrastruktur skema KPBU serta membangun *Public Trust*.

Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Anita Firmanti saat membuka acara ini menyampaikan bahwa adalah suatu hal yang wajar apabila pelaku bisnis lebih berminat untuk berinvestasi pada sektor yang dapat memberikan informasi proyek yang akurat kepada mereka. "Di era keterbukaan informasi ini kita harus bisa memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur, termasuk menarik investor yang tertarik untuk mengetahui tentang Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha atau KPBU," ujar Anita.

Kehadiran LintasPUPR bertujuan untuk mengurangi hambatan-hambatan yang ada di dunia investasi tanah air yang akan meningkatkan partisipasi investasi dari sektor swasta. Dia juga menyebut bahwa adalah hal wajar apabila para pelaku bisnis lebih berminat investasi pada sektor yang dapat memberikan informasi proyek yang akurat kepada mereka. "Di era keterbukaan informasi ini kita harus bisa memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur, termasuk menarik investor yang tertarik untuk mengetahui tentang Kerja Sama Pemerintah Badan Usaha atau KPBU," ujarnya.

Manfaat lain dari layanan dan konsultasi

investasi tersebut antara lain menyediakan informasi-informasi terbaru mengenai proyek dan regulasi terkait investasi infrastruktur Bidang PUPR secara langsung sehingga para calon investor baik nasional maupun internasional dapat mengaksesnya kapan saja dan dari mana saja. Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Yusid Toyib, pada kesempatan yang sama, mengatakan bahwa melalui layanan dan konsultasi informasi investasi infrastruktur bidang PUPR yang berbasis digital, maka seluruh pemangku kepentingan dapat mengakses informasi dan layanan investasi infrastruktur PUPR di mana saja, kapan saja, dan pada perangkat apapun (*anywhere, anytime, any devices*).

"Hal ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden RI bahwa di era keterbukaan dan kompetisi, kita dituntut bekerja dengan lebih keras, bergerak lebih cepat dan bertindak lebih tepat. Era keterbukaan dan kompetisi itu hadir melalui teknologi digital yang bentuk konkretnya sudah kita lihat bersama, yakni dalam bentuk layanan informasi dan konsultasi berbasis aplikasi", tutur Yusid. Yusid juga menyampaikan bahwa layanan konsultasi investasi yang bisa diakses melalui URL <http://lintas.pu.go.id> ini, diharapkan dapat meningkatkan



LintasPUPR bertujuan untuk mengurangi hambatan-hambatan yang ada di dunia investasi tanah air yang akan meningkatkan partisipasi investasi dari sektor swasta.

minat swasta untuk mau ikut berpartisipasi dalam membangun infrastruktur khususnya bidang PUPR.

Di tempat yang sama, selain *launching* layanan konsultasi investasi, dilaksanakan pula Seminar Urgensi Transformasi Tata Kelola Layanan Konsultasi Investasi Bidang PUPR di Era Digital, yang menghadirkan narasumber terkemuka seperti Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Yusid Toyib, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Kominfo Rosarita Niken Widiastuti, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Bappenas Wismana Adi Suryabrata, Sekretaris Deputi SDM Aparatur Kementerian PAN RB Aba Subagja, Kepala Pusat Inovasi Pelayanan Informasi Publik Deputi Inovasi Administrasi Negara LAN-RI Erfi Muthmainah dan *Chief of Business Development* PT. Astratel Nusantara Krist Ade Sudiyono. **(Sumber: Kompu DJBK)**

Tingkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja Konstruksi Melalui MTU

Indri Eka Lestari

Ditjen Bina Konstruksi melakukan serah terima pinjam pakai MTU ke Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Nusa Tenggara Barat

Era Masyarakat Ekonomi ASEAN, yang membuka jalan untuk tenaga kerja asing bekerja di Indonesia menjadi tantangan tersendiri bagi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mengejar ketertinggalan agar tenaga kerja Indonesia mampu bersaing dari tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia. Menargetkan 750.000 orang tenaga kerja konstruksi bersertifikat di 2019, menjadi pemicu semangat tersendiri bagi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR. Karenanya, semenjak ditetapkannya target tersebut berbagai upaya dilakukan seperti melakukan pelatihan-pelatihan kepada tenaga kerja konstruksi di seluruh Indonesia.

Beberapa upaya yang dilakukan antara lain: melalui Pelatihan menggunakan *Mobile Training Unit* (MTU) yaitu jenis pelatihan yang dilakukan secara mobile menggunakan kendaraan, yang ditujukan agar dapat mendatangi para peserta tenaga kerja konstruksi di seluruh pelosok Indonesia; Pelatihan *On the Job Training* yaitu jenis pelatihan yang mendatangi para tenaga kerja konstruksi langsung di lokasi pekerjaannya.

Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Yusid Toyib menambahkan bahwa semenjak berlakunya Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi pada 12 Januari lalu, setiap pekerjaan konstruksi harus dikerjakan oleh tenaga kerja konstruksi bersertifikat. Untuk itu, guna mempercepat tercetaknya tenaga kerja konstruksi bersertifikat, MTU menjadi solusi mengingat kemampuannya yang dapat menjangkau hingga ke pelosok dan 'menjemput bola' hingga ke tempat proyek-proyek konstruksi.

Keberadaan MTU tersebut akan mengatasi keterbatasan jangkauan pelatihan tenaga konstruksi sekaligus menjadi percontohan bagi pemangku kepentingan dalam peningkatan sumber

daya manusia tenaga konstruksi yang berada di daerah.

Penyerahterimaan MTU ke provinsi telah dilakukan sejak 2014 lalu, dimana selanjutnya pengelolaan MTU untuk melatih tenaga kerja konstruksi diserahkan kepada pemerintah provinsi. Di tahun 2017 ini Kementerian PUPR melalui Ditjen Bina Konstruksi telah menyerahkan pengelolaan



Sejak berlakunya Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi pada 12 Januari lalu, setiap pekerjaan konstruksi harus dikerjakan oleh tenaga kerja konstruksi bersertifikat.

tiga unit *Mobile Training Unit* (MTU) atau unit pelatihan keliling, antara lain kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat dan Jawa Timur. Acara serah terima ini dilakukan oleh Dirjen Bina Konstruksi Yusid Toyib dalam acara yang dilakukan pada waktu yang terpisah kepada Plt. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah



Whitono, Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Lebu Raya kepada Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola, plt. Gubernur Sulawesi Tenggara M. Saleh Lasata, Gubernur Nusa Tenggara Barat, H. Muh. Nuh dan Asisten II Ekonomi Pembangunan Provinsi Jawa Timur Fattah Jasin.

Program MTU ini sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo, yang menyampaikan bahwa percepatan pembangunan yang merata di tanah air harus terus dilaksanakan yang tentunya harus didukung oleh kesiapan tenaga kerja konstruksi di berbagai wilayah. Sehingga rakyat Indonesia tidak hanya menjadi penonton di negeri sendiri ketika pemerintah sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan infrastruktur. Sejalan dengan hal tersebut, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengarahkan bahwa MTU tambahan dikirimkan kepada provinsi yang memiliki produktivitas tenaga kerja tinggi, dan memiliki karakteristik kepulauan serta memiliki proyek strategis nasional.

Selama periode pinjam pakai pengelolaan *Mobile Training Unit* ini, pemerintah provinsi diharapkan dapat mengatur dan menyusun/membuat perencanaan kerja sama dalam pemanfaatan MTU kepada mitra kerjanya (pemerintah kabupaten/kota, Perguruan Tinggi, Sekolah Menengah Kejuruan, Badan Usaha Jasa Konstruksi, LPJK, dan Balai Latihan Kerja).

BERITA UTAMA

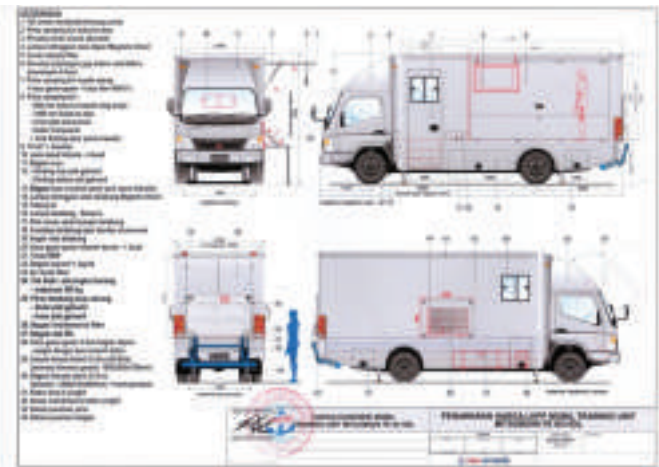
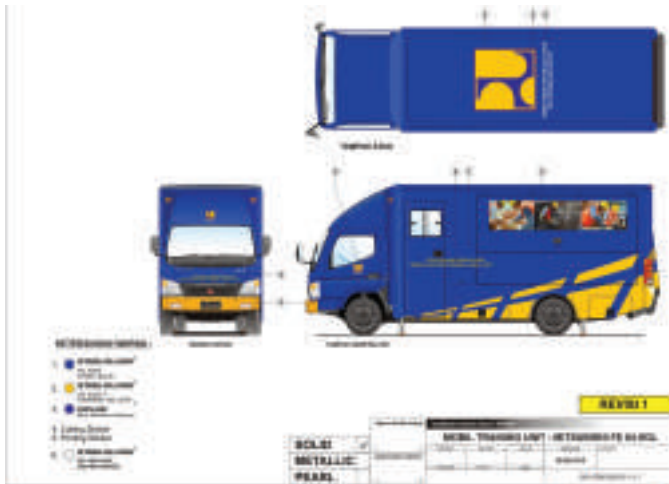
“Saya berpesan agar MTU ini dimanfaatkan semaksimal mungkin, hingga menghasilkan tenaga kerja konstruksi bersertifikat dan kompeten”, tegas Yusid Toyib. Karena dengan adanya tenaga kerja konstruksi yang berkualitas, bisa dipastikan pembangunan infrastruktur dapat dilakukan dengan baik, dengan pembangunan infrastruktur yang baik otomatis mendorong

untuk mendukung pembangunan infrastruktur terutama di daerah.

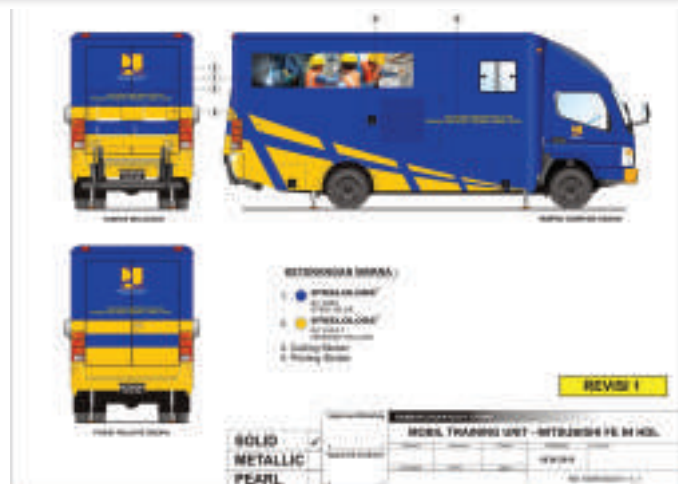
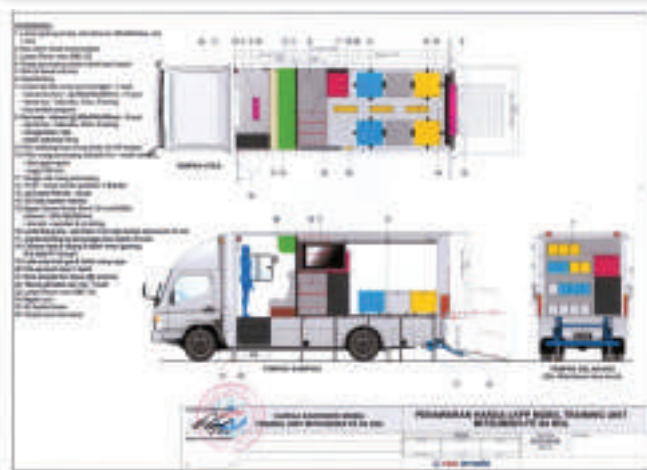
“Ketersediaan jumlah tenaga konstruksi bersertifikat menjadi isu penting bagi terselenggaranya pasar jasa konstruksi berkelanjutan di Indonesia, khususnya di wilayah strategis dan kami akan memaksimalkan pemanfaatan MTU ini”, tambah Longki.

“Adanya MTU ini akan memberikan peluang yang begitu besar kepada tenaga-tenaga terampil yang ada di daerah kami untuk bekerja lebih produktif dalam membangun infrastruktur di NTT”, pungkas Frans Lebu Raya, Gubernur Nusa Tenggara Timur.

Mobile Training Unit (MTU) merupakan mobil pelatihan keliling yang digunakan



Mobile Training Unit (MTU) merupakan mobil pelatihan keliling yang digunakan untuk mengenalkan dan mengajarkan pola kerja efektif dan efisien pada tenaga kerja konstruksi.



pertumbuhan ekonomi dan jika ekonomi baik maka kesejahteraan rakyat meningkat.

Tanggapan yang positif pun disampaikan oleh pihak gubernur yang menerima MTU. Gubernur Sulawesi Tengah mengungkapkan apresiasinya kepada Kementerian PUPR yang telah memberikan pengelolaan satu unit MTU kepada Pemprov Sulawesi Tengah. Karena dengan memberikan MTU tersebut, Kementerian PUPR telah berkontribusi

Di waktu yang berbeda, Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin mengapresiasi keseriusan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian PUPR dalam meningkatkan daya saing pekerja konstruksi melalui unit pelatihan keliling. “Pekerja konstruksi yang ada di daerah bisa mengasah potensi skill kemampuan mereka dalam meningkatkan daya saing dengan keberadaan MTU”, ucap Muh. Amin.

untuk mengenalkan dan mengajarkan pola kerja efektif dan efisien pada tenaga kerja konstruksi. MTU dapat menjangkau kantong-kantong tenaga kerja konstruksi dan pusat-pusat lokasi proyek yang belum terjangkau oleh institusi/lembaga/balai Pelatihan Konstruksi (*remote area*).

Fattah Jassin memberikan apresiasi kepada Kementerian PUPR. “Pembangunan Surabaya dari data yang ada adalah kota

yang mempunyai progress pembangunan infrastruktur yang tinggi dan sudah banyak yang sudah terealisasi, hingga banyak studi banding dari mancanegara. Hal ini membuktikan SDM kita sebenarnya sudah mampu untuk berdaya saing di mancanegara”, ujarnya.

Diharapkan dengan meningkatnya pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia, kesejahteraan masyarakat dapat meningkat dan tidak lagi terjadi ketimpangan dengan kota-kota besar di Indonesia.*



Peran DJBK dalam Peningkatan Kinerja Perusahaan BUMN Perum Bidang Sumber Daya Air dan Perumahan

✍️ Henrico ST, MT & Yolanda Indah Permatasari SE, MM

Tidak dapat dipungkiri bahwa air sangat penting bagi keberlangsungan dan kesejahteraan kehidupan masyarakat. Sumber daya air memiliki 3 fungsi utama yang menjadikannya sangat penting untuk dikelola dengan baik yang meliputi fungsi sosial, lingkungan hidup dan ekonomi. Fungsi sosial berarti bahwa sumber daya air untuk kepentingan umum lebih diutamakan daripada kepentingan individu atau golongan. Fungsi lingkungan hidup berarti bahwa sumber daya air menjadi bagian dari ekosistem sekaligus sebagai tempat kelangsungan hidup flora dan fauna. Sedangkan fungsi ekonomi berarti bahwa sumber daya air dapat didayagunakan untuk menunjang kegiatan usaha.

Di sisi lain, air juga memiliki daya rusak yang dapat mengganggu kehidupan masyarakat. Untuk mempertahankan ketiga fungsi utama dari sumber daya air serta mengendalikan daya rusak air, diperlukan upaya pengelolaan sumber daya air yang terpadu, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Pengelolaan sumber daya air tersebut, memerlukan prasarana sumber daya air yang merupakan bangunan air beserta bangunan lainnya, untuk menunjang secara langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan-kegiatan pengelolaan sumber daya air.

Salah satu tantangan yang dihadapi Pemerintah dalam melakukan pengelolaan sumber daya air adalah terbatasnya anggaran untuk melakukan pembangunan prasarana sumber daya air sekaligus menjaga fungsionalitas dari prasarana sumber daya air eksisting melalui kegiatan operasi dan pemeliharaan. Berdasarkan dokumen Bappenas per tanggal 16 Februari 2016, terdapat *gap* pendanaan sebesar Rp187 Triliun untuk dapat memenuhi target penyediaan infrastruktur SDA tahun 2015-2019.

Di sisi lain, sektor perumahan juga sangat penting dan mempengaruhi kehidupan orang banyak. Sebagai salah satu kebutuhan

dasar manusia, idealnya rumah harus dimiliki oleh setiap keluarga, terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dan bagi masyarakat yang tinggal di daerah padat penduduk di perkotaan. Negara juga bertanggung jawab dalam menyediakan dan memberikan kemudahan perolehan rumah bagi masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman serta keswadayaan masyarakat. Berdasarkan dokumen Bappenas per tanggal 16 Februari 2016, terdapat *gap* pendanaan sebesar Rp100 Triliun untuk dapat memenuhi target penyediaan infrastruktur perumahan tahun 2015-2019.

Menyadari besarnya tantangan penyediaan infrastruktur SDA dan Perumahan, pemerintah membentuk Badan Usaha Milik Negara Perum (BUMN Perum) di bidang SDA yakni Perum Jasa Tirta (PJT I dan PJT II) dan di bidang perumahan yakni Perum Perumnas. Tugas yang diberikan kepada PJT I dan PJT II adalah untuk melaksanakan sebagian tugas pemerintah dalam mengelola sumber daya air sekaligus diberikan kesempatan untuk melakukan perusahaan atas sumber daya air. Perusahaan atas sumber daya air tersebut dapat meliputi perusahaan PLTA/PLTM/PLTMH dan perusahaan SPAM.

Sedangkan untuk Perum Perumnas, Pemerintah memberikan tugas untuk membangun perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebagai bagian dari program pemerintah, melaksanakan pengelolaan rumah susun sewa, rumah susun milik dan rumah susun khusus serta melakukan *land banking*.

Sesuai UU 19/2003 tentang BUMN, hakikat dari dibentuknya BUMN yang bersifat perum adalah untuk memberikan kemanfaatan umum berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. Hal ini berbeda dengan BUMN yang bersifat persero yang dibentuk dengan tujuan selain menyediakan barang/jasa yang berkualitas tinggi juga mengejar keuntungan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Oleh

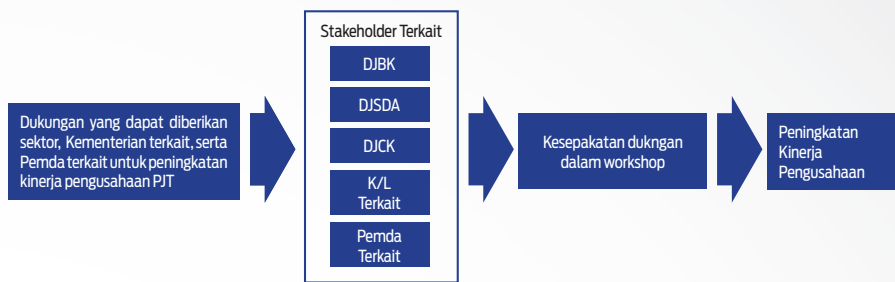
sebab itu PJT I, PJT II dan Perumnas sebagai BUMN yang bersifat perum, dituntut untuk dapat melakukan sebagian tugas pemerintah untuk melayani masyarakat dan memberikan kemanfaatan umum dengan tingkat kesehatan perusahaan yang baik.

Kunci untuk dapat melaksanakan amanat undang-undang tersebut adalah kemampuan ketiga BUMN Perum tersebut berinovasi melakukan perusahaan yang dapat mengoptimalkan sumber daya yang telah diberikan oleh pemerintah melalui serah kelola aset atau melalui suntikan dana dari penambahan modal yang dilakukan oleh negara.

Sejak tahun 2015, Ditjen Bina Konstruksi mendapatkan tugas memfasilitasi pembinaan perusahaan BUMN Perum di lingkungan Kementerian PUPR, yang sebelumnya dilakukan oleh Biro Keuangan, Setjen Kementerian PUPR. Berbagai kegiatan pun telah dilakukan untuk mendukung BUMN Perum melakukan tugasnya secara optimal. Salah satu peran yang telah konsisten dijalankan adalah dengan menjadi bagian penting dalam Tim Evaluasi Tarif Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air yang ditetapkan melalui keputusan Menteri PUPR. Sebagai informasi, tarif BJPSDA adalah tarif yang harus dibayar oleh pemanfaat air baku untuk PLTA, SPAM maupun industri. Penerimaan BJPSDA tersebut akan digunakan untuk kegiatan operasi dan pemeliharaan wilayah sungai.

Berdasarkan Permen PUPR Nomor 15/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR, DJBK memiliki tugas memfasilitasi pembinaan perusahaan BUMN Perum di lingkungan Kementerian PUPR. Kerangka kerja dari fasilitasi pembinaan perusahaan tersebut dapat dilihat pada gambar 1.1

Selain terkait dengan tarif BJPSDA, Ditjen Bina Konstruksi juga berperan dalam mengkoordinasikan pembahasan-pembahasan di internal Kementerian PUPR terhadap Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Laporan Tahunan



Gambar 1 1 Kerangka Kerja Fasilitasi Pembinaan Pengusahaan BUMN Perum

Perusahaan. Pada tahun 2017, Ditjen Bina Konstruksi melalui Direktorat Bina Investasi Infrastruktur, berinisiatif untuk memfasilitasi peningkatan kinerja perusahaan BUMN Perum dengan melakukan *workshop* di Bandung untuk PJT II dan di Balige untuk PJT I. Adapun *workshop* menghasilkan beberapa isu strategis yang perlu ditindak lanjuti oleh *stakeholders* terkait.

Workshop Peningkatan Kinerja Pengusahaan

Workshop Peningkatan Kinerja Pengusahaan dilakukan di dua tempat yakni di Bandung untuk Perum Jasa Tirta II pada tanggal 12 Mei 2017 dan di Balige untuk Perum Jasa Tirta I pada tanggal 23 Mei 2017. Tujuan dilaksanakan *workshop* antara lain untuk mengidentifikasi isu-isu strategis kinerja perusahaan PJT I dan PJT II dan rencana tindak lanjut dari setiap isu strategis. Pada kedua *workshop* tersebut, Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Yusid Toyib, dihadapan para *stakeholders* yang berasal dari PDAM, Pemda Kabupaten/Kota di Wilayah Kerja PJT I dan PJT II, mendorong Perum Jasa Tirta untuk kreatif dalam melakukan pengusahaan sumber daya air dengan menggandeng swasta, sehingga dapat optimal membantu pemerintah dalam pengelolaan sumber daya air sesuai penugasan.

Beberapa isu strategis yang dibahas dengan seluruh *stakeholders* dalam *workshop* merupakan usulan dari PJT I dan PJT II. Untuk PJT II, isu strategis yang dibahas

antara lain: (i). Implementasi tarif BJPSDA yang masih belum optimal terutama tarif yang harus dibayar pemanfaat air untuk PLTA di wilayah Sungai Citarum; (ii). Pengusahaan SPAM yang belum optimal karena belum adanya payung hukum jual beli air curah kepada PDAM untuk SPAM non regional; (iii). Rencana perusahaan *pump power storage powerplant* Jatiluhur yang belum dapat dilaksanakan karena beberapa kendala kelembagaan; (iv). Penambahan penugasan wilayah sungai yang masih belum dapat terlaksana karena harus merevisi peraturan pemerintah pembentukan PJT II.

Sedangkan untuk PJT I, isu strategis yang dibahas antara lain: (i). Masih belum adanya penetapan tarif BJPSDA untuk pemanfaat PDAM dan industri di wilayah Sungai Toba Asahan; (ii). Peran PJT I yang masih belum optimal di wilayah Sungai Toba Asahan, karena belum adanya Pola Operasi Waduk dan Alokasi Air (POWAA) dan belum bergabungnya PJT I di Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) di Provinsi Sumatera Utara (iii). Tinggi muka air Danau Toba yang sempat berada pada titik minimum, sehingga rencana aksi konservasi kawasan perlu dilakukan, adapun PJT I telah melakukan modifikasi cuaca melalui kerja sama dengan BPPT.

Adapun beberapa hal yang disepakati oleh *stakeholders* terkait untuk ditindaklanjuti dalam kedua *workshop* antara lain: (i). PJT II akan terus secara intensif berdialog dengan PT. PLN terkait kewajiban pembayaran tarif BJPSDA untuk pemanfaatan air baku untuk PLTA

Cirata Saguling (ii). Perlu adanya revisi PP Pembentukan PJT II untuk mengakomodasi penambahan wilayah dan penjualan air curah kepada PDAM untuk SPAM non regional; (iii). Untuk rencana proyek *pump power storage power plant* sebaiknya dilakukan pembahasan dengan PT. PLN mengingat *intake* air baku akan dilakukan di bendungan Cirata Saguling dan dapat mempengaruhi pola alokasi waduk; (iv). PJT I akan mengajukan surat kepada Menteri PUPR untuk mengusulkan tarif BJPSDA pemanfaat air PDAM dan industri di wilayah Sungai Toba Asahan (v), PJT I akan terus secara intensif berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Sumatera II, Ditjen SDA, untuk membahas pola operasi waduk dan alokasi air (POWAA) serta mensinkronkan kegiatan operasi dan pemeliharaan di wilayah Sungai Toba Ssahan. Secara komprehensif, gambar 1.2 memberikan kerangka *gap* antara kondisi ideal dan kondisi yang diharapkan dalam pengusahaan PJT.

Ditjen Bina Konstruksi akan terus memfasilitasi implementasi dari rencana tindak lanjut dari kedua *workshop* tersebut. Salah satunya dengan melakukan validasi hasil *workshop* dengan seluruh unit organisasi terkait di Kementerian PUPR. Adapun dalam validasi tersebut, diketahui bahwa beberapa rencana tindak lanjut telah dilakukan antara lain, telah adanya komitmen awal PT. PLN untuk memasukan komponen tarif BJPSDA dalam penyesuaian tarif penjualan listrik PLTA Juanda oleh PJT II, dengan beberapa catatan seperti perlu adanya revisi terhadap SK Menteri PUPR tentang penetapan tarif akibat adanya pembatalan UU SDA oleh Mahkamah Konstitusi.

Selain itu, PJT I juga telah mengirimkan surat usulan kepada Menteri PUPR untuk penetapan tarif BJPSDA di wilayah Sungai Toba Asahan untuk pemanfaat PDAM dan industri. Seluruh kegiatan dan upaya yang dilakukan oleh DJBK tersebut tentunya dilakukan dengan harapan agar peran DJBK dapat betul-betul dirasakan manfaatnya oleh seluruh *stakeholders* BUMN Perum bidang Sumber Daya Air dan Perumahan. Hal ini sesuai dengan arahan Bapak Dirjen Bina Konstruksi dalam pembukaan kedua kegiatan *workshop* agar DJBK cq. Direktorat Bina Investasi Infrastruktur konsisten memfasilitasi pembinaan perusahaan BUMN Perum dengan memantau tindak lanjut dari *workshop*, sehingga hasilnya dapat dirasakan oleh seluruh pihak. *

KONDISI EKSTING		KONDISI YANG DIHARAPKAN
1. Kualitas dan debit air yang menurun	WORKSHOP PENINGKATAN KINERJA PENGUSAHAAN	1. PJT dapat menjaga kualitas dan keberlanjutan layanan air baku
2. Pengelolaan SDA yang belum terkoordinasi dengan baik		2. PJT dapat berkoordinasi dengan seluruh stakeholder dalam mengelola SDA
3. Implementasi tarif BJPSDA belum optimal	Validasi hasil workshop	3. Tarif BJPSDA dapat terimplementasi dengan baik
4. Pengusahaan SPAM oleh PJT belum optimal		4. Perusahaan SPAM oleh PJT dapat membantu tercapainya target 100% layanan air bersih
5. Pengusahaan PLTA/PLTM/PLTMH oleh PJT belum optimal	REKOMENDASI KEBIJAKAN	5. Pengusahaan PLTA/PLTM/PLTMH oleh PJT dapat berjalan dengan baik
6. Pengembangan wilayah melalui Keppres (PJT 1) dan revisi PP (PJT 2)		6. Pengembangan wilayah dapat dilakukan secara fleksibel

Gambar 1 2, kerangka gap kondisi ideal vs eksisting

Kementerian PUPR Optimis Mampu Tingkatkan Daya Saing Infrastruktur

Untuk meningkatkan daya saing Indonesia di tengah persaingan global, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mempercepat pembangunan infrastruktur di segala bidang mulai dari pembangunan jalan, jembatan, bendungan, saluran irigasi, air bersih, perumahan dan penataan kawasan. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, mengatakan, infrastruktur merupakan kunci untuk meningkatkan peringkat daya saing Indonesia.

Berdasarkan data *The Global Competitiveness Report 2016-2017* dari *World Economic Forum* (WEF), daya saing Indonesia berada pada peringkat 41 dan daya saing infrastruktur pada peringkat 60. Kementerian PUPR menargetkan dapat meningkatkan peringkat daya saing infrastruktur dari peringkat 60 naik menjadi peringkat 40 tercapai tahun depan. Meskipun, peringkat daya saing infrastruktur Indonesia pada tahun 2016 telah berhasil naik ke peringkat 60 meningkat 2 poin dari tahun 2015 pada posisi 62.

"Peringkat daya saing infrastruktur kita memang sudah naik ke 60. Tapi sekarang kita harus lari lebih cepat. Sebagai contoh di Tiongkok bangun tol 4.000-5.000 km per tahun. Dalam RPJMN 2015, kita targetkan hanya 1.000 km. Tetapi kita upayakan bisa 1.800 km tol selesai dan sebagian fungsional pada akhir 2019," ujar Menteri Basuki yang disampaikan pada Forum Nasional Daya Saing Infrastruktur di Jakarta, Selasa (22/8).

Untuk itu Menteri PUPR menyatakan ada empat hal yang perlu dilakukan untuk bisa mengejar ketertinggalan dalam rangka meningkatkan daya saing infrastruktur Indonesia, yakni aspek regulasi, kualitas

Sumber Daya Manusia (SDM), inovasi dan riset serta kepemimpinan (*leadership*).

"Daya saing bukan lagi ditentukan oleh besar dan kecil atau lemah dan kuat sebuah negara tapi mana yang lebih cepat, lebih baik dan lebih murah. Salah satu yang mempercepat adalah dengan penyederhanaan regulasi untuk memperbaiki *ease of doing business*," ungkap Basuki.

Forum Nasional Daya Saing Infrastruktur dimaksudkan sebagai sarana untuk pembahasan isu serta opsi kebijakan terobosan secara terstruktur dan sistematis yang patut diambil pemerintah dan juga dukungan pemangku kepentingan terkait untuk peningkatan peringkat daya saing infrastruktur yang lebih *SMART* (*simple, measurable, attainable, reasonable* dan

timebond). Seluruh pihak terkait seperti badan usaha jasa konstruksi, perusahaan teknologi dan rantai pasok energi, asosiasi badan usaha, asosiasi profesi, akademisi dan investor akan dilibatkan

"Apa yang kami lakukan selama ini, mendapatkan anggaran yang besar-besar, memang karena kita tertinggal. Apa yang dilakukan dalam tiga tahun ini hanya untuk mengejar ketertinggalan kita. Tidak ada yang lain," tegas Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Sementara itu Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Yusid Toyib mengatakan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menargetkan



peringkat daya saing infrastruktur Indonesia menjadi peringkat 40 global. "Kami mendorong keterlibatan seluruh pemangku kepentingan sektor konstruksi untuk merumuskan kebijakan yang terstruktur dan sistematis dalam rangka meningkatkan daya saing infrastruktur", ujar Yusid.

"Forum Nasional ini diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan terobosan bagi perbaikan pilar-pilar daya saing negara umumnya dan daya saing infrastruktur khususnya. Dengan demikian langkah-langkah nyata apa saja untuk peningkatan daya saing infrastruktur akan terwujud," lanjut Dirjen Bina Konstruksi.

Forum Nasional Daya Saing Infrastruktur menghadirkan narasumber terkemuka, antara lain: Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Arie Setiadi Moerwanto; Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi,

proyek konstruksi dan mengembalikannya kepada pemerintah setelah masa konsesi berakhir.

Dalam kesempatan yang sama Aviliani Pengamat Ekonomi dan Daya Saing Indonesia menyoroti investasi BUMN dalam pembangunan jalan tol sudah berjalan baik terlebih dengan adanya jaminan pemerintah. Namun investasi infrastruktur yang bersumber dari swasta perlu didorong lagi. Disamping tol, perlu terus didorong infrastruktur yang berkontribusi pada pengentasan kemiskinan.

Sementara itu, Danang Parikesit Sementara itu, Danang Parikesit Pengamat Infrastruktur Transportasi Indonesia, berpendapat bahwa pembangunan infrastruktur tidak semata untuk mengejar pertumbuhan (*growth*) di pusat-pusat ekonomi produktif, namun juga

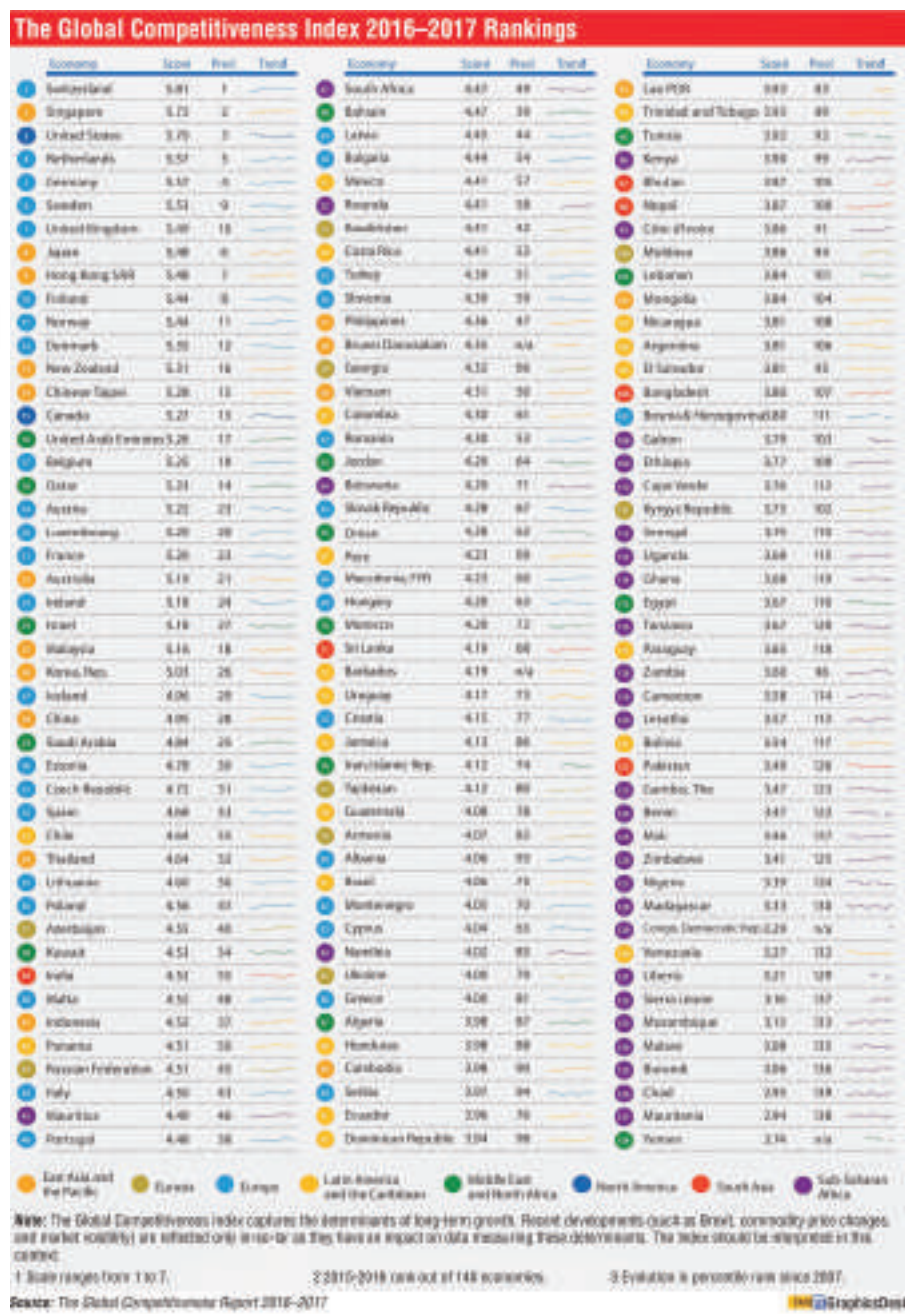
berfungsi memenuhi kebutuhan redistribusi kesejahteraan di kawasan-kawasan yang sedang berkembang atau tertinggal guna mengurangi kesenjangan. "Transportasi yang baik, jaminan pasokan energi, ketersediaan dan kualitas air minum dan sanitasi merupakan kunci meningkatkan kesetaraan kesejahteraan," jelasnya.

Forum Nasional Daya Saing Infrastruktur merupakan puncak dari rangkaian kegiatan dalam rangka menyusun rekomendasi kebijakan terkait peningkatan daya saing infrastruktur, yang sebelumnya didahului dengan kegiatan evaluasi berupa Pra Forum Nasional, Pra *Focus Group Discussion*, *Focus Group Discussion* terhadap pilar-pilar penyusun daya saing serta Konferensi Pers terkait persiapan Forum Nasional Daya Saing Infrastruktur pada 15 Agustus 2017 lalu.



dan Elektronika
K e m e n t e r i a n
Perindustrian I Gusti
Putu Suryawirawan; Deputi
Infrastruktur Dan Pengembangan
Wilayah Kementerian Koordinator
Bidang Perekonomian Wahyu Utomo;
Deputi Bidang Hukum dan Perundang-
Undangan Kementerian Sekretariat Negara
Muh. Saptamurti; Kepala Badan Pengkajian
dan Penerapan Teknologi Unggul Priyanto;
Pengamat Ekonomi dan Daya Saing
Indonesia Aviliani; Pengamat Infrastruktur
Transportasi Indonesia Danang Parikesit;
dan Direktur Utama PT. Wijaya Karya
Bintang Perbowo.

Dalam Forum Nasional Daya Saing Infrastruktur tersebut, Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Arie Setiadi mengatakan diperlukan inovasi skema pembiayaan. Untuk meningkatkan investasi dalam pembangunan jalan tol, ditawarkan berbagai skema kerja sama dengan badan usaha antara lain menggunakan model *build finance operate transfer*. Bentuk kerja sama ini pihak swasta merencanakan, membangun, membiayai, mengoperasikan



BERITA TERKINI



Pemerintah Dukung Pengembangan Karir Insinyur di Indonesia

 Kristinawati Pratiwi Hadi & Indri Eka Lestari

Masifnya pembangunan infrastruktur di Indonesia ternyata tidak sebanding dengan jumlah insinyur di Indonesia. Jumlah insinyur di Indonesia masih jauh tertinggal bila dibandingkan dengan negara tetangga di ASEAN seperti Malaysia, Singapura dan Vietnam. Dikutip dalam *beritasatu.com*, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah akan memanfaatkan sebaik-baiknya bonus demografi yang dimiliki melalui pemerataan pendidikan, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi.

Presiden mengatakan proporsi SDM dengan kualifikasi pendidikan di Indonesia hanya 7,2 persen dari angkatan kerja. Padahal negara tetangga Malaysia skor pendidikannya sudah mencapai 20,3 persen dan negara-negara organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (*Organization for Economic Cooperation and Development/OECD*) sebesar 40,3 persen.

Selain itu, Presiden Jokowi juga mengatakan jumlah insinyur per 1 juta penduduk di Indonesia jauh lebih rendah. Di Indonesia hanya 2.671 insinyur untuk per 1 juta penduduk, dibandingkan Malaysia yang jumlahnya mencapai 3.333 insinyur, Vietnam 9.037 insinyur, dan Korea Selatan 25.309 insinyur.

Hal tersebut cukup mengkhawatirkan mengingat posisi geografis Indonesia yang berkepulauan dan sangat luas, ditambah saat ini Indonesia berada pada tahap pembangunan terutama di daerah-daerah seperti Pulau Kalimantan, Sumatera, Sulawesi dan Papua. Selain itu, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) telah resmi dimulai, yang artinya saat ini tenaga kerja asing boleh bekerja di Indonesia dengan kemampuan yang ia miliki. Dengan demikian persaingan tenaga kerja konstruksi nasional dengan luar negeri semakin terbuka.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah dalam hal ini melakukan berbagai upaya untuk mendorong kiprah tenaga ahli di bidang konstruksi. Salah satunya melalui Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan Praktik Keinsinyuran pada Program Profesi Insinyur Bidang Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Penandatanganan ini dilakukan oleh Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Yusid Toyib dengan Dirjen Kelembagaan Iptek dan Dikti Kemenristekdikti Patdono Suwignjo, Kamis (27/7) di Jakarta.

Upaya pemerintah ini dilakukan untuk mempercepat penyediaan insinyur dan tenaga kerja konstruksi bersertifikat. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Jasa Konstruksi No. 2 Tahun 2017, yang mewajibkan seluruh tenaga kerja konstruksi harus memenuhi sertifikat kompetensi kerja. Selain itu menurut data Persatuan Insinyur Indonesia (PII), Indonesia masih kekurangan 120.000 orang insinyur hingga tahun 2019 untuk dapat memenuhi kebutuhan insinyur di dalam pembangunan infrastruktur.

“Jangan sampai pembangunan infrastruktur terkendala karena kekurangan tenaga profesional, selain itu agar lulusan-lulusan insinyur kita benar-benar berkiprah di sektor konstruksi bukan justru berkecimpung di sektor lain”, ujar Yusid Toyib.

Yusid menambahkan mahasiswa atau peserta didik jurusan teknik nantinya harus didorong untuk tetap berkecimbung dalam bidang teknik. Agar pelajaran yang sudah didapat saat kuliah dapat diimplementasikan dalam dunia kerja. Untuk itu, Kementerian PUPR saat ini tengah membahas rancangan anggaran untuk para insinyur muda (lulusan teknik) untuk bisa mendapatkan upah yang sesuai, agar terus melanjutkan pekerjaan pada bidang konstruksi.

Dukungan Kementerian PUPR diwujudkan melalui Program Profesi Insinyur dan *link & match* untuk mendorong peserta didik SMK, politeknik, dan Perguruan Tinggi dapat memiliki sertifikat kompetensi pada saat kelulusan. Dukungan lainnya juga dilakukan antara lain: Penyelarasan kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan dunia industri konstruksi; Program pemagangan pada proyek-proyek di Kementerian PUPR, BUMN, BUIK swasta; Peningkatan remunerasi tenaga kerja konstruksi; serta Penyelarasan sertifikasi antara LPJK dan BNSP.

Program Studi Program Profesi Insinyur (PSPPI) telah diluncurkan oleh Kemenristekdikti pada tahun 2016, yang bertujuan untuk mengakui kompetensi keinsinyuran melalui pendidikan berbasis pengalaman kerja di bidang keinsinyuran. Dalam pelaksanaannya PSPPI diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Kementerian terkait, organisasi profesi termasuk PII, dan kalangan industri dengan mengikuti standar nasional pendidikan tinggi dan standar Program Profesi Insinyur.*

Pengembangan Mitigasi Risiko Investasi Infrastruktur

Harry Setyawan & Yolanda Indah Permatasari

Presiden Joko Widodo dalam program Nawacita Kabinet Kerja ini berkomitmen melakukan percepatan dalam penyelenggaraan infrastruktur. Kebutuhan pembiayaan infrastruktur periode 2015-2019 sebesar Rp1.915 T dengan kemampuan pemenuhan oleh pemerintah hanya sebesar 67% atau Rp1.289 T. *Gap* yang belum dapat dipenuhi oleh pemerintah, yaitu sebesar Rp626 T, diusahakan dengan pengoptimalan peran swasta dengan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Dua karakteristik dasar KPBU dalam penyediaan infrastruktur adalah waktu kerja

terutama dari sudut pandang investor, risiko adalah kemungkinan dimana investor gagal mencapai target pengembalian investasi, termasuk keuntungan dari menginvestasikan sejumlah dana untuk pembangunan infrastruktur. Dari sudut pandang pemerintah, risiko adalah dimana pemerintah tidak dapat menyediakan infrastruktur atau layanan kepada publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Risiko dalam penyediaan infrastruktur sesungguhnya adalah peristiwa-peristiwa yang mungkin terjadi

keputusan dari badan usaha dan juga lembaga keuangan lain untuk membiayai suatu proyek infrastruktur. Kemampuan dari Penanggungjawab Proyek Kerja Sama (PJPK) dalam mengidentifikasi dan mengalokasikan risiko-risiko yang dituangkan ke dalam Perjanjian KPBU menjadi hal yang krusial dan menentukan keberlangsungan serta kelancaran proses investasi infrastruktur.

Salah satu kunci keberhasilan dalam proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha adalah kajian risiko yang komprehensif dan alokasi risiko yang optimal antara badan usaha dan pemerintah. Dalam penyusunan kajian risiko, PJPK dapat mengelompokkan risiko-risiko yang telah diidentifikasi kedalam kategori risiko sesuai Acuan Alokasi Risiko PT. PII dimana dibagi ke dalam 11 kategori yaitu:

- a. Risiko lokasi,
- b. Risiko desain, konstruksi dan uji operasi,
- c. Risiko sponsor;
- d. Risiko finansial,
- e. Risiko operasional,
- f. Risiko pendapatan (*revenue*),
- g. Risiko konektivitas jaringan
- h. Risiko *interface*;
- i. Risiko politik
- j. Risiko kahar (*force majeure*);
- k. Risiko kepemilikan aset.

Berbeda dengan skema penyediaan infrastruktur konvensional, dalam skema KPBU, dimungkinkan bagi pemerintah, dalam hal ini PJPK, untuk mendistribusikan atau mengalokasikan risiko kepada Badan Usaha Pelaksana (BUP) sehingga pemerintah terlepas dari kewajiban menanggung biaya yang timbul sebagai dampak dari risiko yang gagal dimitigasi, misalnya dampak dari risiko kenaikan biaya konstruksi yang disebabkan karena kesalahan desain atau karena keterlambatan dari kontraktor dalam memenuhi kewajibannya. Pengalokasian suatu risiko kepada BUP akan secara langsung memengaruhi biaya yang dibebankan kepada proyek investasi, oleh karenanya mengalokasikan suatu risiko, yang sebenarnya lebih mampu dikendalikan oleh PJPK kepada BUP, akan mengakibatkan berkurangnya tingkat *Value for Money* dari proyek. Bagi pemerintah, pengalokasian sebagian risiko proyek



sama yang panjang dan pembagian risiko antara pemerintah dengan badan usaha. Proyek KPBU pada umumnya melibatkan nilai investasi yang besar dan memiliki jangka waktu yang panjang sehingga risiko-risiko yang dapat terjadi dalam proyek akan sangat dapat mempengaruhi tingkat pengembalian investasi.

Dalam tataran teoritis, risiko adalah suatu kejadian ketidakpastian yang memiliki dampak kepada pencapaian tujuan. Dalam konteks investasi infrastruktur,

pada Proyek Kerja Sama selama berlakunya Perjanjian Kerja Sama, yang dapat mempengaruhi secara negatif investasi dari Badan Usaha, baik berupa ekuitas maupun pinjaman dari pihak ketiga.

Banyaknya kegagalan bangunan dalam proyek infrastruktur salah satu faktor yang menyebabkan adalah kurang dipertimbangkannya risiko-risiko yang dapat timbul dalam proses investasi infrastruktur selama periode kerja sama. Hal ini secara langsung memengaruhi

merupakan keuntungan yang didapatkan dalam melakukan KPBU tersebut. Bagi sektor swasta, risiko proyek penyediaan infrastruktur yang diserap, akan selalu dinilai dengan berapa tingkat pengembalian investasi yang akan didapatkan dalam melakukan kerja sama tersebut.

Dalam mengalokasikan risiko, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan karena terdapat beberapa risiko dimana pemerintah bukan pihak yang paling mampu mengendalikan atau mengelola kemungkinan dan dampak dari risiko tersebut dengan biaya terendah. Badan usaha tentunya juga hanya bersedia menyerap risiko yang sesuai dengan kemampuan mereka mengelola risiko tersebut yang pada akhirnya akan dikonversikan menjadi sebuah biaya yang akan ditambahkan kepada komponen biaya modal dan biaya operasi dan pemeliharaan yang secara riil akan mereka keluarkan.

Prinsip yang lazim diterapkan untuk alokasi risiko adalah:

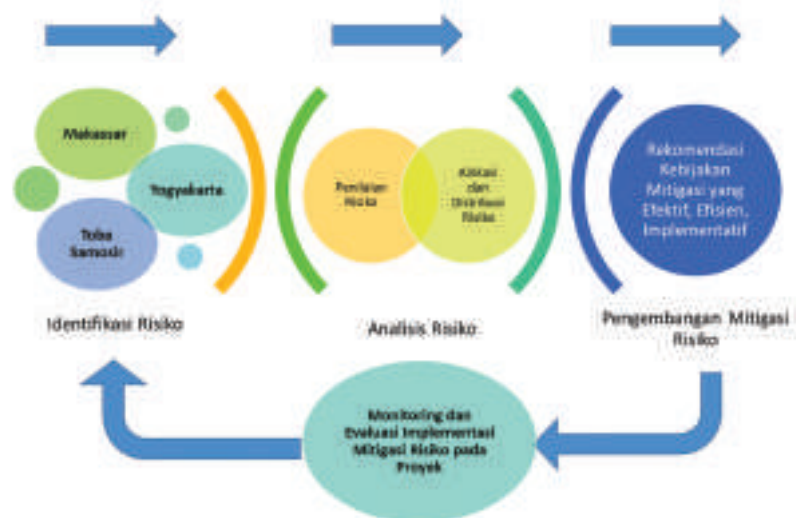
- Risiko harus dialokasikan kepada pihak yang paling mampu mengendalikan kemungkinan terjadinya risiko;
- Risiko harus dialokasikan kepada pihak yang paling mampu mengendalikan dampak dari terjadinya risiko tersebut terhadap proyek;
- Risiko harus dialokasikan kepada pihak yang paling mampu menyerap risiko tersebut dengan biaya terendah.

Dalam analisis risiko Proyek KPBU, PJKP perlu menyusun upaya-upaya mitigasi atas risiko-risiko yang telah diidentifikasi. Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa, mungkin tidak semua risiko yang telah dialokasikan kepada PJKP dapat dikendalikan sepenuhnya oleh PJKP. PJKP mungkin memerlukan dukungan atau koordinasi dengan pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan mitigasi risiko dan juga pemantauan pengelolaan risiko selama masa konsesi. Dalam proses pemantauan dan evaluasi risiko, risiko-risiko proyek dapat dikelompokkan berdasarkan tahapan pelaksanaan kerja sama seperti perencanaan, penyiapan, transaksi, operasional dan pemeliharaan, dan serah terima aset, yang dimaksudkan untuk mempermudah pengelolaan risiko pada setiap proses KPBU.

Dalam usahanya untuk percepatan penyelenggaraan infrastruktur, Pemerintah melalui Perpres 78 Tahun 2010 juga membentuk Lembaga yang dalam hal ini, PT. Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT.PII), untuk melakukan penjaminan

terhadap risiko-risiko yang dalam perjanjian KPBU, dialokasikan kepada pemerintah. Diharapkan dengan adanya penjaminan ini maka *bank ability* dari proyek-proyek KPBU akan meningkat yang akhirnya juga menjamin kelancaran penyelenggaraan proyek infrastruktur di Indonesia.

Pengembangan mitigasi risiko sektor PUPR yang saat ini dilakukan Direktorat Bina Investasi Infrastruktur, dilakukan dengan mengelaborasi pengetahuan teknis sektoral PUPR yang spesifik, untuk kemudian dianalisis secara mendalam terhadap probabilitas terjadinya risiko dan dampak dari terjadinya risiko terhadap proyek KPBU itu sendiri. Ketersediaan data dan informasi terkait risiko yang dimiliki oleh unit organisasi di Kementerian PUPR menjadi faktor kunci dalam melakukan analisis terhadap probabilitas terjadinya risiko dan tingkat/dampak dari terjadinya risiko terhadap proyek itu sendiri. *Framework* dalam melaksanakan pengembangan mitigasi risiko ini dapat dilihat pada bagan berikut:



Dalam mengelaborasi pengetahuan teknis sektoral PUPR untuk kemudian dianalisis secara mendalam, Direktorat Bina Investasi Infrastruktur telah melakukan kegiatan *workshop* supervisi teknis analisis risiko investasi infrastruktur ke beberapa kota yaitu:

- Makassar, Rabu 25 Januari 2017
- Yogyakarta, Jumat 5 Mei 2017
- Toba Samosir, Senin 22 Mei 2017, dan
- Validasi hasil *workshop* supervisi teknis analisis risiko investasi infrastruktur kepada *stakeholder* di Bintaro, Jumat 21 Juli 2017

Salah satu hasil dari *workshop* tersebut antara lain: penerapan praktis dari prinsip-

prinsip alokasi risiko yang dapat dijadikan contoh untuk diterapkan pada proyek-proyek KPBU sebagai berikut:

- Risiko yang efektivitas dan efisiensinya, berdasarkan pengalaman, sulit untuk dikendalikan pemerintah, sebaiknya ditanggung pihak swasta;
- Risiko di luar kendali kedua belah pihak, atau sama-sama dapat dipengaruhi kedua belah pihak, sebaiknya ditanggung bersama (contoh risiko kejadian kahar);
- Risiko yang dapat dikelola pemerintah, karena posisinya lebih baik atau lebih mudah mendapatkan informasi dibandingkan swasta (contoh risiko peraturan atau legislasi) sebaiknya ditanggung pemerintah;
- Risiko yang walaupun sudah ditransfer, tetap memberikan eksposur kepada pemerintah atau PJKP dalam hal menghambat tersedianya layanan penting ke masyarakat, atau dengan kata lain jika BUP gagal memenuhi kewajiban, maka pemerintah dapat mengambil alih proyek.

Dari hasil identifikasi pada *workshop* tersebut, didapat juga masukan-masukan dalam merumuskan rekomendasi kebijakan alokasi dan mitigasi risiko yang efektif, efisien dan implementatif, dan menjadi acuan yang penting dalam penyusunan pra-studi kelayakan proyek KPBU. Dengan memetakan profil risiko investasi infrastruktur di daerah dan menyusun rumusan upaya mitigasi risiko dan *debottlenecking* permasalahan dalam penyelenggaraan investasi infrastruktur, maka diharapkan dapat mendukung percepatan penyediaan infrastruktur yang berkualitas di Indonesia tanpa harus bergantung kepada anggaran pemerintah yang berasal dari pajak.



Kebudayaan Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) Terampil yang kompeten memegang peranan yang sangat penting untuk mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia. Proses sertifikasi tenaga kerja konstruksi yang diselenggarakan pada prinsipnya tidak hanya untuk melindungi para tenaga kerja konstruksi tersebut, namun sekaligus sebagai bukti bahwa tenaga tersebut adalah tenaga yang kompeten di bidangnya. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang mengamanatkan bahwa setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang jasa konstruksi wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja, dan setiap penyedia jasa wajib mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja. Oleh karena itu, Sertifikat Kompetensi Kerja menjadi bukti pengakuan negara atas kompetensi tenaga kerja ahli (SKA) maupun tenaga kerja terampil (SKT).

Dalam upaya menyebarkan pemahaman terkait Undang-Undang Jasa Konstruksi pada masyarakat, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaksanakan kegiatan PEKAN JASA KONSTRUKSI (PJK) 2017 yang dilaksanakan sejak 28 Agustus hingga 22 September 2017 di Palembang. Pada pembukaan acara tersebut, Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian PUPR, Ir. Yusid Toyib, M.Eng.Sc., menyampaikan bahwa Pekan Jasa Konstruksi ini dilakukan untuk mensosialisasikan secara komprehensif Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, tidak hanya melalui metode satu arah, melainkan

Rangkaian Pekan Jasa Konstruksi 2017 di Palembang **Lomba Tukang dan Uji Kompetensi & Sertifikasi dengan Menggunakan Mobile Training Unit**

 Bayu Dwi Samoedra, S.T., M.A. & Dimas Ricky Swaramahardhika, S.Sos., M.Sc.
Balai Jasa Konstruksi Wilayah II Palembang, Ditjen Bina Konstruksi



juga dengan memberikan contoh nyata kegiatan-kegiatan pembinaan konstruksi seperti pameran terkait tugas dan fungsi Pembinaan Jasa Konstruksi, Pameran *Mobile Training Unit* (MTU), Kegiatan Seminar K3 dan *Workshop* Pemberdayaan Jasa Konstruksi, Pelatihan *Assessor*, Pelatihan *Management on Trainee* (MOT), maupun Kegiatan Proses Uji Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi yang dikemas secara menarik dalam bentuk Perlombaan Tukang (Tenaga Kerja Konstruksi Terampil).

Kegiatan Perlombaan Tenaga Kerja Konstruksi Terampil terdiri dari 4 (empat) kategori, yaitu: Tukang Pasang Bata, Tukang Pasang Keramik, Tukang Pembesian dan Tukang Instalasi Listrik yang diselenggarakan di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Lomba ini diikuti oleh 60 (enam puluh) orang peserta dengan rincian:

- 20 (dua puluh) orang peserta Lomba Tukang Pasang Bata;
- 20 (dua puluh) orang peserta Lomba Tukang Pasang Keramik;
- 10 (sepuluh) orang peserta Lomba Tukang Pembesian; dan
- 10 (sepuluh) orang peserta Lomba Tukang Instalasi Listrik.

Kegiatan Lomba ini dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2017 sebagai rangkaian kegiatan yang dilaksanakan sebelum pembukaan resmi PJK 2017 sekaligus sebagai sarana untuk mencetak tenaga kerja konstruksi yang kompeten dan unggul yang dapat dibuktikan kompetensinya dengan adanya sertifikat keterampilan (SKT). Lebih jauh lagi, perlombaan ini dipandang sebagai sebagai cara yang efektif untuk mensosialisasikan penggunaan *Mobile Training Unit* (MTU) untuk kegiatan pelatihan maupun sertifikasi tenaga kerja konstruksi terampil yang telah menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Perlombaan Tenaga Kerja Konstruksi Terampil merupakan kerja sama antara Balai Jasa Konstruksi Wilayah II Palembang Kementerian PUPR, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, LPJK Provinsi Sumatera Selatan dan PT. Semen Baturaja, Tbk. selaku pihak sponsor. Lingkup perlombaan ini antara lain: pemberian materi pembekalan terkait lomba oleh Ir. Bambang Irawan, M.T. sesuai dengan jabatan kerja masing-masing peserta, dan tidak lupa pembekalan terkait Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan Konstruksi Berkelanjutan.

Saat pelaksanaan, para peserta lomba dibagi menjadi menjadi 4 kelompok. Setiap kelompok melakukan pengisian administrasi yang dilanjutkan dengan uji

wawancara teknis dengan para *assessor*/ dewan juri, setelah itu, dilanjutkan dengan praktek pertukangan di lapangan. Para peserta lomba diberikan soal/gambar teknis yang harus diselesaikan dengan bahan-bahan material yang tersedia di dalam jangka waktu tertentu.

Setiap peserta lomba terlihat antusias, tertib, bersemangat dan bersungguh-sungguh saat mengikuti kegiatan lomba, bahkan hingga berakhirnya kegiatan lomba. Dewan juri menilai hasil karya para tukang tersebut tidak hanya dari ketepatan terhadap soal/gambar kerja yang diberikan, melainkan juga aspek-aspek lain seperti ketepatan penggunaan alat-alat pertukangan, keamanan dan kebersihan area kerja, efektifitas penggunaan material lomba dan lain-lain.

Pada akhirnya, setelah melalui proses penjurian yang cukup alot, dewan juri pun memutuskan untuk menetapkan Juara I, II dan III untuk masing-masing kategori lomba, yaitu sebagai berikut:

Lomba Tukang Pasang Bata

- Juara I: AL FAZRI
- Juara II: MANSYUR
- Juara III: HENRI

Lomba Tukang Pasang Keramik

- Juara I: M. TEGUH
- Juara II: HENDRA
- Juara III: SUNARTO

Lomba Tukang Pembesian

- Juara I: JUANDA
- Juara II: YONO JUMINO
- Juara III: MUCHLIS

Lomba Tukang Instalasi Listrik

- Juara I: PANHAR
- Juara II: A. MASYUR H.D.
- Juara III: HARI AZHARI

Seluruh peserta kegiatan Lomba Tukang dalam rangka PEKAN JASA KONSTRUKSI 2017 di Palembang kemudian diundang untuk menghadiri Kegiatan Pembukaan secara resmi PJK 2017 pada tanggal 28 Agustus 2017 di Hotel Novotel Palembang. Pemberian Trofi dari Pemerintah Provinsi

Sumatera Selatan dan hadiah dari sponsor kepada para pemenang lomba diserahkan oleh Walikota Palembang, Direktur Jenderal Bina Konstruksi, Direktur Pemasaran PT. Semen Baturaja, Tbk., Ketua LPJK dan Provinsi Sumatera Selatan.

Juara I untuk setiap kategori lomba masing-masing berhak mendapatkan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), Juara II masing-masing berhak mendapatkan Rp750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan Juara III masing-masing berhak mendapatkan Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Tidak hanya itu, selain para pemenang lomba, seluruh peserta kegiatan lomba pun telah mengikuti proses sertifikasi dan apabila lulus maka berhak memiliki Sertifikat Kompetensi (SKT).

Diharapkan, dengan adanya kegiatan perlombaan semacam ini, para TKK terampil khususnya di Sumatera Selatan dapat memiliki nilai tambah, peningkatan kompetensi, pengalaman berkompetisi dan lebih siap dalam menghadapi persaingan global terutama dengan telah diberlakukannya era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang dimulai sejak 01 Januari 2016 yang lalu.

Dan pada akhirnya, kegiatan pembinaan konstruksi dalam bentuk uji kompetensi dan sertifikasi TKK terampil pun dapat dikemas sedemikian rupa hingga akhirnya mampu menarik pihak-pihak lain untuk turut bekerja sama dan ikut serta dalam kegiatan-kegiatan pembinaan konstruksi tersebut. Hal ini sangat penting dalam rangka mensosialisasikan substansi dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi kepada pihak-pihak atau *stakeholders* terkait. Oleh karena itu, di masa mendatang diharapkan lebih banyak kegiatan serupa yang dapat dilaksanakan untuk memenuhi target Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bina Konstruksi yaitu sebanyak 750.000 tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat di tahun 2019.*



Rangkaian Pekan Jasa Konstruksi 2017 di Palembang

Seminar Kecelakaan Kerja Konstruksi dalam Perspektif Kontrak Konstruksi

 Ricky S



Dalam seminar tersebut para panelis memaparkan mengenai industri konstruksi yang merupakan salah satu industri yang memiliki resiko tinggi, dianggap berbahaya dan dapat mengancam nyawa seseorang. Sedangkan dari perspektif kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Adapun Jasa Konstruksi sebagai salah satu bidang jasa dalam sarana pembangunan, sudah sepatutnya diatur dan dilindungi secara hukum agar terjadi situasi yang objektif, kondusif dan tanpa kecelakaan dalam pelaksanaannya.

Menurut Data dari BPJS Ketenagakerjaan terkait kecelakaan kerja pada tahun 2015, terdapat 105.182 kasus dengan korban meninggal dunia sebanyak 2375 orang, yang berarti dengan jumlah tersebut kecelakaan kerja mengalami peningkatan hingga 5% setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan tingginya angka kecelakaan kerja konstruksi dibanding sektor lainnya dikarenakan, salah satu faktornya adalah, pemenuhan perundangan dan peraturan pada umumnya dilaksanakan dengan kurang baik, serta rendahnya tingkat kesadaran masyarakat



Apabila pelaksanaan K3 Konstruksi telah terlaksana otomatis kualitas konstruksi juga akan meningkat dan meningkatkan daya saing

akan keselamatan dan kesehatan kerja yang merupakan salah satu landasan asas penting dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.

Direktur Jenderal Bina Konstruksi juga menyebutkan penyebab utama kecelakaan kerja antara lain karakteristik proyek konstruksi yang bersifat unik, lokasi/ lingkungan kerja proyek konstruksi yang berbeda beda, pengaruh cuaca pada saat pelaksanaan proyek konstruksi, waktu

pelaksanaan proyek konstruksi yang terbatas, tenaga kerja yang digunakan dalam pelaksanaan proyek konstruksi, peralatan kerja yang digunakan pada proyek konstruksi, material/bahan yang digunakan untuk proyek serta metode kerja pelaksanaan proyek.

Adapun faktor lain penyebab kecelakaan kerja proyek konstruksi antara lain: tidak ada identifikasi bahaya yang digunakan dalam penyusunan program pengendalian bahaya; tidak ada rencana K3 dan tidak memiliki prosedur K3; tidak ada *job safety analysis*; lemahnya pengawasan K3; kurang memadainya kualitas dan kuantitas ketersediaan peralatan pelindung diri; penggunaan metode pelaksanaan yang kurang tepat; tidak dilibatkannya tenaga ahli K3 konstruksi; serta kurang disiplinnya para tenaga kerja dalam mematuhi ketentuan mengenai K3.

Perlu juga kita ketahui bersama bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, Pasal 96 menyebutkan bahwa: "Setiap penyedia jasa dan/atau pengguna jasa yang tidak memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

- a. Peringatan tertulis
- b. Denda administratif
- c. Penghentian sementara kegiatan layanan jasa konstruksi
- d. Pencantuman daftar hitam
- e. Pembekuan izin
- f. Dan pencabutan izin

Pada akhirnya dengan adanya UU No. 2 Jasa Konstruksi tingkat kemajuan dan pengetahuan di bidang konstruksi bisa berkembang dengan baik melalui peningkatan kesadaran pelaku jasa konstruksi akan keselamatan kerja konstruksi dan keberlanjutan. Apabila pelaksanaan K3 Konstruksi telah terlaksana maka otomatis kualitas konstruksi di Indonesia juga akan meningkat yang pada gilirannya meningkatkan daya saing bangsa di kancah internasional.*

Bersinergi dengan *Stakeholders* Konstruksi Sertifikasi 3255 Tenaga Konstruksi Secara Serentak Mendapatkan Rekor MURI

 Kompu DJBK & Indri Eka Lestari

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengemban tugas cukup berat di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini, pasalnya orang nomor satu Indonesia tersebut mengintruksikan Kementerian PUPR untuk membangun infrastruktur seperti jalan, jalan tol, jembatan, waduk dan perumahan untuk rakyat. Meski memiliki amanah yang berat, Kementerian PUPR terus berusaha untuk menyelesaikan tugas yang diberikan hingga akhir 2019.

Menteri Basuki menjelaskan, pembangunan infrastruktur nasional menjadi prioritas Presiden Joko Widodo pada periode 2015-2019. Keberhasilan pembangunan bidang PUPR ditentukan oleh kualitas tenaga kerja konstruksi. Tahun 2018, Kementerian PUPR menerima amanat membelanjakan anggaran sebesar Rp106, 91 triliun. "Hasilnya harus berkualitas," tegas Menteri Basuki

Untuk mencapai target tersebut, dibutuhkan jumlah tenaga kerja konstruksi dalam jumlah yang besar, sehingga penyiapan tenaga kerja konstruksi yang terampil, profesional, dan bersertifikat adalah tugas bersama dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) saat ini. Dari 7 juta tenaga kerja konstruksi di Indonesia baru sekitar 1 juta tenaga yang telah disertifikasi.



"Tahun ini kami targetkan 500 ribu tenaga kerja dapat disertifikasi dan untuk itu kami menggandeng seluruh stakeholders untuk mencapai target tersebut", jelas Menteri Basuki. Dari target tersebut, sebanyak 300 ribu orang telah dilakukan sertifikasi hingga akhir Juli 2017.

Ditjen Bina Konstruksi menargetkan 750.000 orang tenaga kerja konstruksi bersertifikat sampai dengan tahun 2019, untuk itu dibutuhkan kerja sama antara pemerintah dengan BUMN, swasta atau stakeholder bidang Konstruksi. Beberapa waktu lalu Kementerian PUPR bekerjasama dengan *stakeholders* konstruksi, mensertifikasi sebanyak 3255 tenaga kerja konstruksi secara serentak, dalam acara

sertifikasi tenaga kerja terampil dan bimbingan teknis keahlian konstruksi tahap II di lingkungan internal dan eksternal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pembukaan acara yang dilaksanakan di Pintu VII Gelora Bung Karno Jakarta ini, Senin (21/8) lalu, dilakukan oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

"Kita membutuhkan percepatan sertifikasi tenaga kerja konstruksi, sebab pembangunan infrastruktur yang sedang gencar dilaksanakan pemerintah tidak bisa menunggu lagi, harus didukung oleh sumber daya manusia yang handal dan kompeten", ujar Basuki.

Tidak hanya itu, perlunya percepatan sertifikasi untuk mendorong daya saing pada sektor konstruksi. Data *World Economic Forum* (WEF) menunjukkan bahwa daya saing infrastruktur Indonesia menempati urutan ke-60, naik dari posisi ke-62 pada tahun lalu, namun secara global masih tertinggal di bawah Malaysia, Singapura, Thailand dan Brunei Darussalam.

"Saya mengajak peran aktif *stakeholders* jasa konstruksi baik badan usaha, lembaga, asosiasi, kontraktor, lembaga pendidikan dan seterusnya, untuk bersama-sama Pemerintah mendukung pengembangan infrastruktur. Dan saya juga berharap sertifikasi hari ini menjadi pendorong agar kerja sama sertifikasi-sertifikasi lain dengan stakeholder konstruksi segera terwujud", tutur Menteri PUPR.



LIPUTANKHUSUS

Patut diingat pula bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi juga telah mengamanatkan kewajiban kepada setiap Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa untuk mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja. Sanksi apabila tidak melaksanakan kewajiban tersebut adalah sampai kepada penghentian sementara layanan Jasa Konstruksi.

Acara sertifikasi tenaga kerja konstruksi ini dilakukan secara *on the job training* pada proyek-proyek strategis baik di lingkungan internal maupun eksternal Kementerian PUPR, dan dilakukan selama 3 (tiga) hari (21-23 Agustus 2017). Terselenggaranya acara ini kerja sama dari Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR melalui Balai Jasa Konstruksi Wilayah III Jakarta dengan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Nasional, LPJK Provinsi DKI Jakarta, LPJK Provinsi Banten, dan LPJK Provinsi Jawa Barat.

Dijelaskan oleh Kepala Balai Balai Jasa Konstruksi Wilayah III Jakarta Riky Aditya Nazir, bahwa Pelaksanaan sertifikasi dilakukan secara onsite di 36 lokasi pada proyek-proyek dengan pendanaan APBN (internal PUPR), Pendanaan APBD (Dinas PU SDA DKI Jakarta), dan sumber pendanaan swasta/non APBD-APBN. Sedangkan ceremonial pembukaan sertifikasi dilaksanakan secara serentak 3 Lokasi (Pintu VII GBK, Dinas PU SDA DKI, dan Proyek Sentraland Cengkareng PT.Brantas Abipraya).

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono pecahkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) dengan melakukan sertifikasi tenaga kerja terbanyak secara serentak sebanyak 3.255 orang. Sebelumnya, Rekor Muri dalam hal sertifikasi dimiliki oleh PT. Semen Gresik dengan sertifikasi sebanyak 1.255 orang.

Pada acara itu sebanyak 3.047 orang peserta Sertifikasi Tenaga Kerja Terampil (SKTK) meliputi, Tukang, Mandor, *Drafter*, *Surveyor*, *Operator*, Pelaksana dan Pengawas. Sedangkan sebanyak 208 orang Peserta Bimbingan Teknis Keahlian meliputi, Bimbingan Teknis Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), Manajemen Konstruksi (MK), dan Administrasi Kontrak (AK).

Dalam acara tersebut, Menteri PUPR didampingi Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Konstruksi Yusid Toyib, Inspektorat Jenderal Rildo Ananda Anwar, Dirjen Cipta Karya Sri Hartoyo, Sampo Bidang Ekonomi dan Investasi M. Natsir, Sampo Bidang Sosial

Budaya Baby Setiawati Dipokusumo, Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja dan Pejabat Tinggi Pratama Kementerian PUPR.

"Tahun ini kami memiliki dana sebesar Rp350 miliar bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk pembinaan investasi dan kompetensi. Dari nilai tersebut, sebesar 20 persen akan kami gunakan untuk sertifikasi tenaga konstruksi", jelas Yusid.

Dia menjelaskan karena dana tersebut relatif kecil, maka Kementerian PUPR menggandeng Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun swasta untuk menggunakan dana CSR demi membiayai sertifikasi. Pada 2019, ditargetkan 3 juta tenaga kerja konstruksi di Indonesia telah memiliki sertifikasi sebagai komitmen nyata melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Rincian peserta per lokasi proyek antara lain sebagai berikut:

- Pada Satker Penataan Bangunan dan Lingkungan Strategis (Renovasi Komplek Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta) sebanyak: 598 orang, dengan rincian 562 orang peserta Sertifikasi Tenaga Kerja Terampil dan 36 orang peserta Bimbingan Teknis Tenaga Ahli;
- Pada Proyek Dinas PU SDA Provinsi DKI Jakarta sebanyak: 315 orang, dengan rincian 1.207 orang peserta Sertifikasi Tenaga Kerja Terampil dan 108 orang peserta Bimbingan Teknis Tenaga Ahli;
- Pada Proyek-Proyek Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ditjen SDA di Provinsi DKI, Banten, Jawa Barat sebanyak: 246 orang, dengan rincian 226 orang peserta Sertifikasi Tenaga Kerja Terampil dan 20

orang peserta Bimbingan Teknis Tenaga Ahli;

- Pada Proyek-Proyek Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional VI (BBPJN VI) Ditjen Bina Marga sebanyak: 91 orang, dengan rincian 82 orang peserta Sertifikasi Tenaga Kerja Terampil dan 9 orang peserta Bimbingan Teknis Tenaga Ahli;
- Pada Proyek-Proyek Satker Ditjen Cipta Karya di Provinsi DKI, Banten dan Jawa Barat sebanyak: 58 orang, dengan rincian 50 orang peserta Sertifikasi Tenaga Kerja Terampil dan 8 orang peserta Bimbingan Teknis Tenaga Ahli;
- Pada Proyek Pembangunan Wisma Atlet Rusun Kemayoran sebanyak: 118 orang, dengan rincian 108 orang peserta Kerja Terampil dan 10 orang peserta Bimbingan Teknis Tenaga Ahli;
- Pada Proyek Pembangunan MRT Jakarta sebanyak: 112 orang peserta Sertifikasi Tenaga Kerja Terampil;
- Pada Proyek Pembangunan Bandara Internasional Kertajati Jawa Barat sebanyak: 83 orang peserta Sertifikasi Tenaga Kerja Terampil;
- Pada Proyek dengan Sumber Pendanaan Swasta yang diusulkan PT. Brantas Abipraya sebanyak: 364 orang peserta Sertifikasi Tenaga Kerja Terampil;
- Pada Proyek dengan Sumber Pendanaan Swasta yang diusulkan PT. Nindya Karya sebanyak: 218 orang peserta Sertifikasi Tenaga Kerja Terampil;
- Pada Proyek dengan Sumber Pendanaan Swasta yang diusulkan gabungan beberapa kontraktor swasta sebanyak: 62 orang peserta Sertifikasi Tenaga Kerja Terampil.



Rangkaian Pekan Jasa Konstruksi 2017 Di Palembang:

Peninjauan Proyek oleh Awak Media, Bukti Implementasi UUK Pada Proyek Infrastruktur di Palembang

Pembangunan infrastruktur yang ada di Sumsel tak luput dari pantauan Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, dalam hal ini oleh Balai Jasa Konstruksi Wilayah II Palembang. Hasil-hasil pembangunan infrastruktur sudah sepenuhnya diketahui oleh masyarakat luas. Untuk itu sebagai salah satu rangkaian kegiatan Pekan Jasa Konstruksi 2017 di Palembang, dilaksanakan peninjauan ke proyek Pembangunan *Light Rail Transit* di Kawasan Jakabaring Palembang dan ke Proyek Stadion ASEAN Games di Palembang, dengan peserta peninjauan para awak media (tv, cetak, online), pada 28 Agustus 2017.

Disampaikan bahwa Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi salah satunya mengatur tentang Tenaga Kerja Konstruksi harus memiliki sertifikat, yang memiliki ketentuan sebagai berikut :

1. Pasal 70 ayat 1 yang menyebutkan bahwa setiap tenaga konstruksi yang bekerja di bidang jasa konstruksi wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja.
2. Pasal 47 ayat 1 huruf e menyebutkan bahwa kontrak kerja konstruksi paling sedikit harus mencakup uraian mengenai penggunaan tenaga kerja konstruksi, memuat kewajiban memperkerjakan tenaga kerja konstruksi bersertifikat.
3. Pasal 59 ayat 1 menyebutkan bahwa dalam setiap penyelenggaraan jasa konstruksi, pengguna jasa konstruksi dan penyedia jasa wajib memenuhi standar keamanan, keselamatan, keamanan, dan keberlanjutan (K4).
4. Pasal 59 ayat 2 menyebutkan dalam memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan sebagaimana ayat (1) pengguna jasa konstruksi dan/atau penyedia jasa konstruksi harus memberikan persetujuan atas hasil pengajian, perencanaan, pemeliharaan, pembongkaran, pembangunan kembali dan penggunaan material dan peralatan termasuk teknologi yang digunakan, harus mengikuti standar K4 yang ada di dalam ayat (3) seperti standar mutu bahan, mutu peralatan, keselamatan dan kesehatan, prosedur dan hasil pelaksanaan, standar operasi dan pemeliharaan, pedoman perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar pengelolaan lingkungan hidup.
5. Pasal 99 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang jasa konstruksi tidak memiliki sertifikat kompetensi kerja sebagai mana dimaksud dalam pasal 7 Ayat 1 dikenai sanksi administratif berupa pemberhentian dari tempat kerja.
6. Pasal 99 ayat 2 yang menyebutkan bahwa setiap pengguna jasa dan/atau penyedia jasa yang mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang tidak memiliki sertifikat kompetensi kerja sebagai mana dimaksud dalam pasal 70 ayat 2 dikenai sanksi administratif, berupa:
 - a. Denda administratif, dan/atau
 - b. Penghentian sementara kegiatan layanan jasa konstruksi.

Ketentuan tersebut memperlihatkan komitmen pemerintah dalam menekankan pentingnya tenaga kerja konstruksi bersertifikat, dimana dalam kunjungan ke Proyek pembangunan *Light Rail Transit* (LRT) terlihat bahwa tenaga kerja konstruksi mematuhi peraturan tersebut dengan mementingkan standar keselamatan kerja dan nantinya pihak pengelola pembangunan LRT (PT. Waskita Karya) siap mengadakan sertifikasi tukang atau tenaga kerja konstruksi di lingkungan pembangunan LRT untuk mematuhi UU No. 2 Jasa Konstruksi dan menghindari kecelakaan kerja di lingkungannya.

Proyek pembangunan LRT ini ditargetkan selesai Juni tahun 2018 mendatang. LRT Palembang memiliki panjang 23,4 km yang membentang dari Bandara Sultan Mahmud Badarudin II (Kota Palembang) sampai Kawasan OPI/Ogan Permata Indah (Kabupaten Banyuasin). Proyek ini ditargetkan bisa selesai atau beroperasi pada Juni 2018 mendatang sehingga bisa digunakan pada gelaran ASEAN Games 2018. Selain itu, pembangunan LRT Sumatera Selatan ini bertujuan untuk meningkatkan transportasi perkotaan melalui percepatan waktu tempuh, mengurangi keselamatan transportasi di Sumatera Selatan.

Tentunya komitmen pemerintah tersebut bukan hanya ditujukan sebagai syarat administrasi saja, tetapi dengan penggunaan tenaga kerja konstruksi yang kompeten dapat menjadi salah satu faktor tercapainya mutu konstruksi dan meminimalisir terjadinya kegagalan bangunan. Sebagaimana disampaikan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Yusid Toyib pada pembukaan Pekan Jasa Konstruksi 2017 bahwa seluruh tenaga kerja wajib mempunyai sertifikat dan tersertifikasi, dan jika tidak mempunyai sertifikat akan diberikan sanksi. "Seperti apa sanksinya akan diatur nanti", tegas Yusid.

Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2017, aspek keamanan keselamatan kesehatan dan keberlanjutan konstruksi memerlukan keamanan dan kenyamanan. Aman dan nyaman merupakan suatu keharusan yang penting pada suatu produk konstruksi. Dan untuk mewujudkannya memerlukan kerja sama pemerintah dan seluruh *stakeholders* konstruksi. *





Uji dan Sertifikasi Tukang Terampil dalam Mendukung Pembangunan *Jakabaring Sport City*, Palembang

PT. Nindya Karya bekerjasama dengan Balai Jasa Konstruksi Wilayah II Palembang dan Pemerintah Kota Palembang

Sebagaimana kita ketahui di awal tahun 2017 telah terbit Undang-Undang No 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi (UUJK) menggantikan Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Salah satu permasalahan yang menjadi latar belakang terbitnya UUJK No. 2 Tahun 2017 ini adalah terkait tenaga kerja konstruksi (TKK) bersertifikat. Meskipun ketentuan tentang penggunaan TKK bersertifikat sudah ada sejak UUJK No. 18 Tahun 1999, tetapi jumlah TKK yang bersertifikat masih sedikit dan kesadaran pelaku jasa konstruksi pun masih rendah untuk menggunakan maupun mensertifikasi tenaga kerja konstruksinya. Sehingga pada UUJK No. 2 Tahun 2017 ketentuan tersebut dipertegas lagi dengan beberapa ketentuan antara lain pada:

1. Pasal 70 ayat 1 yang menyebutkan bahwa Setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang Jasa Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja;
2. Pasal 47 ayat 1 huruf e yang menyebutkan bahwa Kontrak Kerja Konstruksi paling sedikit harus mencakup uraian mengenai penggunaan tenaga kerja konstruksi, memuat kewajiban mempekerjakan tenaga kerja konstruksi bersertifikat;

3. Pasal 99 ayat 1 yang menyebutkan bahwa Setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang Jasa Konstruksi

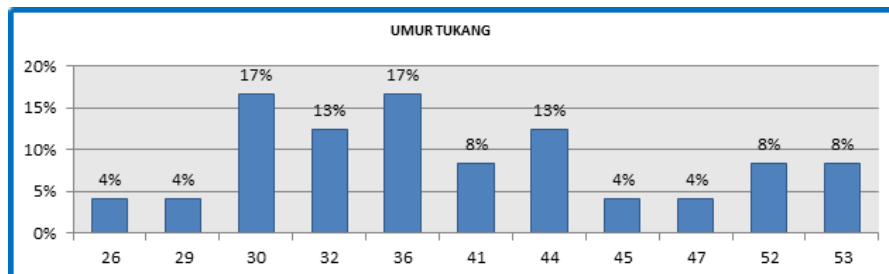
tidak memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pemberhentian dari tempat kerja; dan

4. Pasal 99 ayat 2 yang menyebutkan bahwa Setiap Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa yang mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang tidak memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. denda administratif; dan/atau
 - b. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi.

Ketentuan dalam UUJK No. 2 Tahun 2017 tersebut memperlihatkan komitmen pemerintah dalam menekankan pentingnya TKK bersertifikat. Tentunya komitmen pemerintah akan sertifikasi tersebut bukan hanya ditujukan sebagai syarat administrasi saja, tetapi juga sebagai bukti kompetensi TKK dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Tidak hanya itu, dengan menggunakan TKK yang kompeten mampu mendukung tercapainya mutu konstruksi dan meminimalisir terjadinya kegagalan bangunan. Ketentuan tersebut juga menunjukkan bahwa baik TKK itu sendiri, penyedia jasa dan/ atau pengguna jasa mempunyai kewajiban dan sanksi masing

PROFIL PROYEK VENUE DAYUNG JAKABARING

1. Pengguna Jasa	Satker Pengembangan Penata Bangunan Dan Lingkungan Strategis
2. Penyedia Jasa	PT. Nindya Karya
3. Pekerjaan	Pembangunan Venue Dayung Jakabaring
4. Nilai Pekerjaan	Rp. 134.642.503.000,00
5. Tanggal Kontrak	7 Desember 2017
6. Progres	14,92% (9 April 2017)
7. Masa Pelaksanaan	390 hari



masing terkait TKK bersertifikat.

Dari beberapa hal tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk menjalankan amanah UU tidak cukup peran pemerintah pusat saja, diperlukan kerja sama dari berbagai pihak baik antara lain penyedia jasa dan/atau pemerintah daerah, salah satunya pelaksanaan uji dan sertifikasi oleh PT. Nindya Karya bekerja sama dengan Pemerintah Kota Palembang dan Balai Jasa Konstruksi Wilayah II Palembang.

PT. Nindya Karya sebagai salah satu penyedia jasa yang aktif dalam pembangunan bidang konstruksi dan menggunakan banyak TKK, berkomitmen untuk menggunakan TKK bersertifikat. Perwujudan komitmen tersebut dimulai dengan mensertifikasi tenaga kerja konstruksinya yang berada di kompleks Proyek Pembangunan Jakabaring *Sport City*, Palembang.

Sedangkan Pemerintah Kota Palembang sebagai salah satu pemerintah daerah yang mendukung untuk pembangunan infrastruktur di Palembang, dimana berdasarkan UUK No. 2 Tahun 2017 salah satu kewenangannya adalah penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi. Sedangkan sesuai Permen PUPR Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyatakan bahwa Balai Jasa Konstruksi Wilayah II

Palembang, salah satu fungsinya adalah peningkatan kapasitas jasa konstruksi dan penyelenggaraan jasa konstruksi yang diselenggarakan oleh masyarakat dan pemerintah di wilayah kerja Balai Jasa Konstruksi Wilayah II Palembang.

Berawal dari komitmen bersama untuk mendorong terwujudnya TKK bersertifikat pelaksanaan uji dan sertifikasi bagi TKK Tukang Terampil PT. Nindya Karya di dua lokasi proyek yaitu Venue Dayung Jakabaring dan *Venue Shooting Range* Jakabaring dapat terlaksana.

Pelaksanaan uji dan sertifikasi ini dilakukan dengan 3 tahap yaitu koordinasi, persiapan pelaksanaan dan pelaksanaan kegiatan. Koordinasi awal dilakukan antara PT. Nindya Karya, Pemerintah Kota Palembang, dan Balai Jasa Konstruksi. Dimulai dengan PT. Nindya Karya memberikan gambaran/profil proyek yang sedang dilaksanakan, kemudian dilanjutkan Balai Jasa Konstruksi dengan penjelasan mengenai jenis-jenis metode pelaksanaan pelatihan dan uji sertifikasi. Hal ini penting untuk dilakukan selain untuk memberikan pemahaman kepada PT Nindya Karya dan Pemerintah Kota Palembang, juga untuk menyesuaikan jenis metode pelaksanaan uji dan sertifikasi yang akan digunakan dengan kondisi TKK tukang terampil yang ada dan *progress* pembangunan yang sedang berjalan.

Dari hasil koordinasi disepakati metode

pelaksanaan yang digunakan adalah *On Job Training* (OJT), metode ini dipilih karena biaya yang dikeluarkan minimal dan yang terutama tidak mengganggu *progress* pelaksanaan pembangunan karena tidak diperlukan material tambahan untuk praktek dan proses uji oleh asesor cukup dilakukan ketika para tukang bekerja di lokasi proyek sesuai jadwal penugasan.

Pada tahap berikutnya persiapan pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan menjelaskan teknis pelaksanaan, menghubungi instruktur untuk pembekalan, asesor untuk proses uji, mendata para tukang terampil yang akan di sertifikasi, dan mengumpulkan dokumen pendukung seperti kartu tanda penduduk, daftar riwayat hidup dan/atau ijazah.

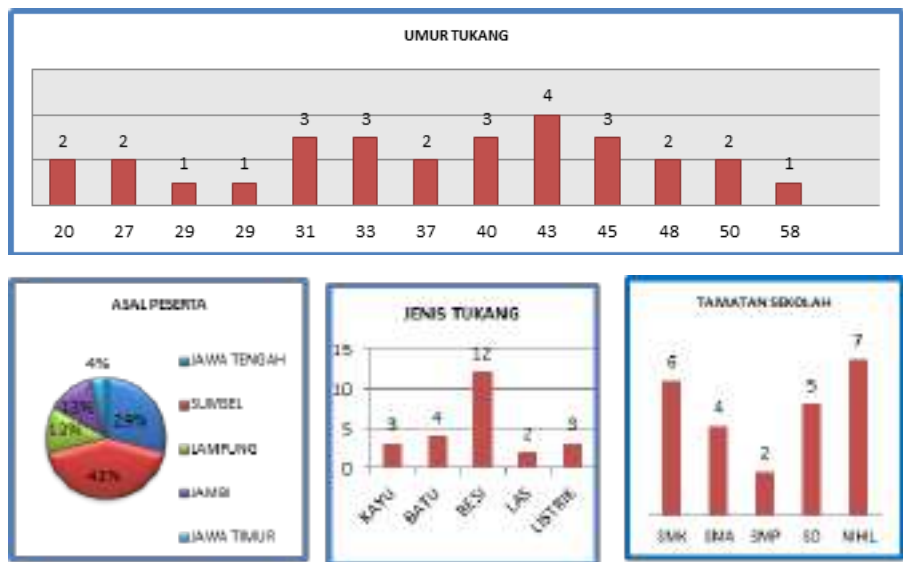
Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah II Palembang mengatakan uji dan sertifikasi merupakan salah satu penilaian untuk ukuran profesionalitas dalam pekerjaan bagi para pekerja tukang terampil, terlebih yang berkaitan dengan proyek konstruksi. Hal ini dilakukan untuk melihat dan menilai kualitas pekerja, apakah sudah sesuai dengan jenis pekerjaannya atau belum. Para pekerja akan dinilai dan diasesmen oleh tim penilai (*assesor*) yang memang tugasnya membantu, membina dan mengawasi, serta peran asesor dapat mengembangkan kompetensi para pekerja dalam menjalankan profesinya dengan baik.

PT. Nindya Karya melalui perwakilannya mengatakan uji kompetensi tenaga kerja konstruksi memang dibutuhkan dalam mendukung pembangunan Jakabaring *Sport City* Palembang. Terlebih untuk pembangunan *venue* yang akan digunakan untuk ajang olahraga taraf internasional ASEAN Games 2018, khususnya pembangunan *venue* dayung yang nantinya akan menjadi salah satu tempat olahraga dayung terbaik di dunia. Oleh karena itu pihak PT. Nindya Karya sangat mendukung uji sertifikasi ini dan akan melaksanakan sertifikasi TKK di proyek pembangunan *venue* yang lain secara bertahap.

Di masa mendatang kegiatan sertifikasi tenaga kerja konstruksi dengan cara kerja sama ini tidak hanya akan berhenti di sini saja, tetapi akan berkembang kepada para pelaku jasa konstruksi lainnya di berbagai lokasi proyek maupun di lokasi lainnya khususnya di wilayah kerja Balai Jasa Konstruksi Wilayah II Palembang. Dengan kerja sama para pihak pelaku jasa konstruksi tentunya pelaksanaan amanah Undang-Undang Jasa Konstruksi akan lebih optimal dan tujuan penyelenggaraan jasa konstruksi akan segera tercapai.

PROFIL PROYEK VENUE SHOOTING RANGE

1. Pengguna Jasa	Satker Pengembangan Penata Bangunan Dan Lingkungan Strategis
2. Penyedia Jasa	PT. Nindya Karya
3. Pekerjaan	Pembangunan dan Renovasi Shooting Range Jakabaring Sport City
4. Nilai Kontrak	Rp. 73.559.243.000
5. Tanggal Kontrak	1 Desember 2016 – 26 September 2017
6. Progres	28,5% (9 April 2017)





Kementerian PUPR Bekerja Sama dengan PT. Brantas, Uji Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi

 Kristinawati Pratiwi H & Mirza Ayu. A



Cetak tenaga kerja konstruksi bersertifikat, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi mendorong kerja sama dengan *stakeholders* konstruksi. Salah satunya dilaksanakan hari, Rabu (2/8) lalu di Surabaya, yaitu kegiatan Fasilitasi Uji Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi kerja sama Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Surabaya serta Balai Material dan Peralatan Konstruksi dengan PT. Brantas Abipraya (Persero).

Kegiatan ini dibuka oleh Dirjen Bina Konstruksi Yusid Toyib dan mengambil lokasi di Proyek Rumah Susun Keputih Surabaya. "Saya sangat mengapresiasi PT. Brantas Abipraya

(Persero) yang menggunakan dana CSR-nya untuk mensertifikasi para pekerjanya", ujar Yusid. Diharapkan hal ini ditiru oleh BUMN karya lainnya, serta *stakeholders* konstruksi lainnya untuk mendukung pengembangan tenaga kerja konstruksi di seluruh wilayah Indonesia.

Uji sertifikasi kali ini diikuti oleh sebanyak 139 peserta yang tersebar di beberapa proyek di Jawa Timur yaitu Mitigasi 11 dan Site Beton Porong, Proyek Waduk Tukul, Pengendalian Banjir Waduk Guntung, Rusun Tambak Wedi, Sepanjang, Keputih, Proyek Pembangunan Jembatan Sembayat dan D.I Pascal. Sedangkan tenaga kerja yang mengikuti kegiatan ini meliputi pelaksana, pengawas, mandor, mekanik, *operator*, *surveyor*, *drafter* dan tukang.

Upaya sertifikasi tenaga kerja ini merupakan amanat dari UU No. 2 Tahun 2017 yang mengatur bahwa seluruh tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang konstruksi wajib bersertifikat. Yusid memotivasi para peserta untuk terus meningkatkan keahliannya agar dapat memiliki pekerjaan yang baik.

"Semoga dengan sertifikasi ini, para peserta mendapatkan pekerjaan yang lebih baik", harap Yusid.


Yusid juga berpesan agar para PPK memastikan semua tenaga kerja yang bekerja di proyek di lingkungannya telah bersertifikat. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Direktur Keuangan dan SDM PT. Brantas Abipraya, Ketua LPJK Jawa Timur, Kepala Satker Pengembangan Perumahan serta Manajer Pengembangan Human Capital PT. Brantas Abipraya.



Uji sertifikasi kali ini diikuti oleh sebanyak 139 peserta yang tersebar di beberapa proyek di Jawa Timur.



Kementerian PUPR Gandeng *United Tractor* Untuk Menjalinkan Kerjasama Pelatihan

 Kristinawati Pratiwi H & Mirza Ayu. A

Menargetkan 750.000 orang bersertifikat, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR terus berusaha memenuhi target tersebut. Dengan melakukan berbagai pelatihan seperti pelatihan mandiri, *on the job training*, Unit Pelatihan Keliling (MTU), dan pelatihan jarak jauh dengan menggunakan jaringan internet.

Namun, dengan keterbatasan anggaran dan kemampuan yang dimiliki Ditjen Bina Konstruksi tidak hanya bisa berjalan sendirian melainkan perlu dorongan dari para stakeholders pada sektor konstruksi terutama para BUMN, asosiasi, lembaga/institusi dan perusahaan swasta dalam bidang konstruksi.

Untuk mendukung tercapainya tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat, pemerintah dalam hal ini Kementerian PUPR menggandeng *stakeholders* untuk melakukan sertifikasi. Sebagai wujud dari upaya ini dilakukan Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi level terampil bidang Bangunan Umum Kerja Sama Balai Jasa Konstruksi Wilayah III Jakarta dengan *United Tractor School* (UT School) di Jakarta, Senin (24/6).

Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Yusid Toyib saat membuka kegiatan ini mengatakan bahwa Pelatihan kerja sama dengan *UT School* menjadi pembekalan bagi tenaga terampil

khususnya bidang bangunan. Diharapkan dengan diselenggarakannya kegiatan ini dapat berpengaruh terhadap ketersediaan tenaga kerja terampil yang sesuai dengan kompetensi yang ada.

Yusid berpesan agar para peserta bersungguh-sungguh dalam mengikuti pelatihan ini dan dapat menyebarkan pemahaman yang didapatkan kepada tenaga kerja lainnya. Ia juga berharap agar 22 orang peserta yang mengikuti kegiatan ini tetap teguh terhadap apa yang sudah diajarkan dalam pelatihan. "Saya harap 22 orang ini bisa mempengaruhi teman-teman yang lain", pesan Yusid pada para peserta.

Pentingnya penggunaan Alat Pelindung

Diri (APD) juga menjadi hal yang diimbau Yusid kepada para peserta. APD merupakan bagian penting dalam bekerja di lapangan. Seluruh perlengkapan seperti *helm*, sarung tangan, *body harness*, sepatu *boots*, dan tali penyanggah harus menjadi kebiasaan agar terhindar dari kecelakaan kerja yang dapat merugikan diri sendiri dan penyelenggaraan proyek.

Peserta kali ini merupakan angkatan pertama kegiatan pelatihan yang akan dilaksanakan dengan total jumlah peserta sekitar 200 tenaga kerja. Keluaran yang diharapkan dapat dicapai dari diadakannya kegiatan ini adalah tenaga terampil yang terlatih dan kompeten di bidangnya.



Salah satu poin penting pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi adalah mengenai penyelesaian sengketa konstruksi melalui Dewan Sengketa atau Arbitrase. Sebelumnya, penyelesaian sengketa melalui proses pengadilan tidak ditangani oleh ahli konstruksi sehingga menghasilkan keputusan yang tidak adil bagi pihak-pihak yang bersengketa. Selain itu, prosedur yang panjang dan rumit di pengadilan dianggap memberikan dampak buruk pada pengembangan bisnis konstruksi. Oleh karena itu, penyelesaian perselisihan pekerjaan konstruksi dilakukan di luar pengadilan dapat diselesaikan melalui Dewan Sengketa.

Hal inilah yang mendasari dilaksanakannya *Dispute Board International Conference* dan *Workshop*, yang menjadi acara untuk menggali lebih dalam bagaimana seluk beluk penyelesaian sengketa konstruksi melalui jalur di luar pengadilan. Acara ini dibuka oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang diwakili oleh Kepala Balitbang Kementerian PUPR Danis Sumadilaga, di Bali, Rabu (23/8).

"Melalui konferensi ini, saya berharap penyelesaian sengketa konstruksi melalui Dewan Sengketa akan memberikan solusi yang lebih baik, lebih cepat, efektif dan efisien untuk menyelesaikan sengketa konstruksi" ujar Danis.

Danis juga menambahkan bahwa perkembangan sektor konstruksi memerlukan pengaturan lebih baik. Oleh karena itu saat ini Kementerian PUPR tengah dalam *progress* penyelesaian target Peraturan turunan Undang-undang Jasa Konstruksi No. 2 Tahun 2017 seperti: PP, PERPES, PERMEN.

Dalam sebuah kontrak konstruksi apabila terjadi sengketa bukanlah masuk kepada masalah pidana melainkan perdata. *Dispute Board* ini adalah suatu badan yang netral yang berperan memediasi permasalahan kontrak tersebut sehingga dapat selesai lebih cepat.

Kementerian PUPR Dukung Penyelesaian Sengketa Konstruksi Melalui Arbitrase



Pada acara ini diharapkan Indonesia dapat mengadopsi cara-cara penyelesaian sengketa dari negara-negara maju seperti USA, UK, Jerman, Jepang, Korea Selatan, Srilangka dan lainnya untuk dapat menyelesaikan permasalahan kontrak lebih cepat dan tidak berlarut-larut.

Pada kesempatan yang sama Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Yusid Toyib mengatakan melalui Undang-Undang Jasa Konstruksi, Pemerintah Indonesia memberikan dukungan terhadap padanya Dewan Sengketa sebagai penyelesaian sengketa konstruksi, baik melalui konsiliasi ataupun mediasi. Keberadaan Dewan sengketa diakui efektif dalam menghindari dan menyelesaikan sengketa pada proyek-proyek konstruksi. Dewan sengketa juga memastikan bahwa proyek dapat berhasil dengan pengurangan biaya dan waktu yang signifikan, serta klaim kontrak yang diselesaikan secara efektif.

"Hal ini memberikan peluang di Indonesia untuk mendorong bisnis konstruksi agar lebih maju dan kompetitif, sehingga mampu mendorong iklim investasi yang sehat", tutur Yusid.

Dewan sengketa terdiri dari seanggota tim yang memiliki otoritas untuk mendefinisikan lingkup pekerjaan yang dipahami oleh para pihak, mendokumentasikan semua dokumen tertulis, mengunjungi proyek secara reguler, dan mengidentifikasi kemungkinan sengketa dan meningkatkan mitigasi risiko.

Acara ini juga diharapkan bisa menjadi peluang bagi pemangku kepentingan konstruksi di Indonesia untuk meningkatkan kemampuan penyelesaian perselisihan dalam pekerjaan konstruksi.

Acara ini diikuti sekitar 200 peserta dari Indonesia dan luar negeri. Hal ini menunjukkan bahwa banyak pemangku kepentingan memerlukan lebih banyak informasi dan pengetahuan tentang penyelesaian perselisihan melalui Dewan Sengketa.

Tantangan yang harus dihadapi adalah bagaimana membentuk peran dewan sengketa di lingkungan hukum perdata, bagaimana cara memeriksa analisis manfaat biaya menggunakan Dewan Sengketa dalam proyek-proyek besar, bagaimana menyesuaikan Dewan Sengketa dalam kebiasaan negara yang dapat kita maksimalkan. Melalui konferensi ini, peserta akan dilibatkan dalam dialog terbuka dan konstruktif tentang Dewan Sengketa dan bagaimana cara kerjanya.

Narasumber yang mengisi acara ini antara lain: Geoffrey Smith, Toshihiko Omoto, Sarwono Hardjomuljadi, Krisna Mochtar, Yusid Toyib, Murray Armes, Ann McGough, Elizabeth Tippin, Salvador Castro, Malith Mendis, Barry Tozer, Richard Kell, Christopher Miers, Nigel Grout dan lainnya.*



”
Perayaan Hari
Kemerdekaan RI
ke 72



”
Penyerahan
Mobile Training Unit
(MTU)



”
Sertifikasi
Massal





**INDONESIA
KERJA
BERSAMA**